

**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**ANALISIS PROSPEK PENERAPAN *ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP)* DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN SINTANG**



**TAPM ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains Dalam Bidang Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :**

**H. MAS'UD NAWAWI**

**NIM : 014941375**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA  
2009**

## ABSTRAK

### **Analisis Prospek Penerapan *One Village One Product (OVOP)* Dalam Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Sintang**

H. Mas'ud Nawawi

Universitas Terbuka

masudmap@yahoo.com

#### **Kata Kunci : Pendekatan OVOP, IKM**

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat prospek penerapan *Ovop* dalam pengembangan industri kecil dan menengah, mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi untuk mendukung dan menghambat penerapannya serta merancang model kebijakan seperti apa yang paling tepat untuk Penerapan *Ovop* dalam pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Sintang. Untuk dapat mencapai tujuan penelitian tersebut, penulis menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah DPRD, Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat serta pelaku industri kecil dan menengah dengan menggunakan *purposif sampling* dan *snowball sampling*.

Sebagai kesimpulan, penelitian ini membuktikan bahwa penerapan *Ovop* dalam pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Sintang memiliki prospek yang baik melalui beberapa parameter, yaitu potensi dukungan ketersediaan sumber daya, potensi kebutuhan pasar, potensi penciptaan lapangan kerja dan potensi terhadap *multiplier effect*. Adapun locus sentra penerapan OVOP dalam pengembangan IKM di Kabupaten Sintang saat ini lebih tepat berada di kecamatan. Mengenai jenis produk unggulan yang dominan di Kabupaten Sintang sebagai perwujudan pendekatan OVOP yaitu industri pengolahan makanan, industri kerajinan dan industri pengolahan kayu,

Faktor-faktor yang berpotensi untuk mendukung penerapan *Ovop* dalam pengembangan industri kecil dan menengah di locus penelitian adalah adanya komitmen dan sekaligus keberpihakan Pemerintah Daerah, faktor kesesuaian potensi sumberdaya alam cukup besar, faktor masyarakat sebagai potensi SDM, faktor tersedianya peluang pasar cukup baik dan faktor tersedianya kelompok usaha sosial masyarakat dalam mendukung penerapan OVOP dalam pengembangan IKM.. Sedangkan faktor-faktor yang berpotensi untuk menghambat yaitu permodalan, teknologi dan dukungan infrastruktur dasar. Adapun Model kebijakan yang paling tepat (fisibel) untuk Penerapan *Ovop* dalam pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Sintang adalah model kebijakan yang bersifat kemitraan.

## **Prospect Analysis Application of One Village One Product (OVOP) In the Industrial Development of Small and Medium Regency Sintang**

**H. Mas'ud Nawawi**

**Universitas Terbuka**

masudmap@yahoo.com

**Keywords:** Approach OVOP, HPI

Basically, this research is conducted in general to know and analyze the level of implementation of Ovop prospects in the development of small and medium industries, to identify the factors which has the potential to support and prevent the implementation of Ovop in the development of small and medium industries to design and model policies such as what the most appropriate for implementation Ovop in the development of small and medium industries in the District Sintang.

To be able to achieve tesebut research, the author uses descriptive research design with a qualitative approach. Sources of data in this research is the DPRD, The Head and the Head of the Village Society and the community leaders of industry and small and medium The sampling techniques that used in this research is purposively sampling and snowball sampling.

Factors that potential to support the implementation Ovop in the development of small and medium industries in the District Sintang is the commitment and keberpihakan Local Government District Sintang, the fitness potential of natural resources is quite large, community factors as potential human resources, the availability factor market opportunity is quite good and availability of factors of social groups in the community to support the implementation of OVOP in the development of HPI in the District Sintang. While the factors that hamper the potential to support the capital is still weak, the support of appropriate technology in order for the HPI is still very low and support the basic infrastructure of the HPI in Sintang District is also still very weak.

The model policy is most appropriate (fisibel) for the implementation of Ovop in the development of small and medium industries in the District Sintang is a model of a partnership policy. Model of this policy to provide equal space to the rights, obligations and roles of local government in the HPI Sintang District in the development of HPI. Than the government as regulator and motivator, but also provide capital injection and builds the application of the technology so that the activities of HPI can be run more optimally. Meanwhile, as a community to implement the HPI HPI activity itself.

**LEMBAR PERSETUJUAN TAPM**

Judul TAPM : Analisis Prospek Penerapan *One Village One Pruduct (OVOP)* dalam Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Sintang.

Penyusun TAPM : H. MAS'UD NAWAWI

NIM : 014 941 375

Progam Studi : Administrasi Publik

Hari/Tanggal :

**Menyetujui :**

Pembimbing II,

Dr. I. Nengah Baskara Wisnu Tedja, M.Ec  
Nip. 19581110 198601 1 001

Pembimbing I,

Dr. Hernawan Harsono, SE, MS, AK  
Nip. 19580815 1987030 1 001

Mengetahui,  
Ketua Bidang Ilmu Program Magister Administrasi Publik. Direktur Program Pascasarjana

Dra. Susanti, M.Si  
Nip. 19671214 199303 2 002



Prof. Dr. Ulin S. Winataputra, MA  
NIP. 1945007 197302 1 001

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PACASARJANA  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PULIK**

**PENGESAHAN**

Nama : H. MAS'UD NAWAWI  
 NIM : 014941375  
 Program Studi : Administrasi Publik  
 Judul TAPM : Analisis Prospek Penerapan One Village One Product (OVOP)  
 dalam Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten  
 Sintang.

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana,  
 Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/ Tanggal : Senin / 14 Desember 2009

Waktu : 17.00 WIB

Dan telah dinyatakan : LULUS

**PANITIA PENGUJI TAPM**

Ketua Komisi Penguji : .....  
 Ir. Edward Zubir, MM.

Penguji Ahli : .....  
 Dr. Roy V. Salomo, M.Soc.Sc

Pembimbing I : .....  
 Dr. Hernawan Harsono, SE.MS.AK.

Pembimbing II : .....  
 Dr. I Nengah Baskara Wisnu Tedja, MEc

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PERNYATAAN**

TAPM yang berjudul Analisis Prospek Penerapan *One Village One Product (Ovop)* Dalam Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Sintang adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Pontianak, Juli 2009  
Yang Menyatakan



**H. MAS'UD NAWAWI**  
**NIM. 014941375**

**UNIVERSITAS TERBUKA**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kehendakNya maka penulis dimampukan untuk menyelesaikan penulisan tesis ini berdasarkan judul yang telah di pilih, yaitu Analisis Prospek Penerapan One Village One Product (*OVOP*) Dalam Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Sintang.

Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis memperoleh petunjuk, bimbingan dari banyak pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Udin S. Winataoutra, MA selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka.
2. Bapak Dr. Hernawan Harsono, SE. MS. AK, selaku dosen pembimbing I.
3. Bapak Dr. I Nengah Baskara Wisnu Tedja, M.Ec, selaku dosen pembimbing II.
4. Bapak Dr. Roy V. Salomo, selaku dosen penguji.
5. Seluruh Dosen, staf pengajar dan administrasi Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.
6. Segenap instansi terkait beserta staf yang telah membantu dalam proses pengumpulan data.

Penulis menyadari Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu kritik dan saran membangun sangat diharapkan. Akhirnya, semoga segala amal budi baik bapak, ibu, saudara/saudari sekalian diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Amiin.

Pontianak, Juli 2009  
Penulis,

**H. Mas'ud Nawawi**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>		
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>		
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>		
<b>KATA PENGANTAR</b>		
<b>DAFTAR ISI</b>		
<b>DAFTAR GAMBAR</b>		
<b>DAFTAR DIAGRAM</b>		
<b>DAFTAR TABEL</b>		
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>		
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
A.	Latar Belakang Masalah .....	1
B.	Perumusan Masalah .....	8
C.	Tujuan Penelitian .....	8
D.	Kegunaan Penelitian .....	9
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A.	Kajian Teori .....	10
B.	Kerangka Berfikir .....	35
C.	Definisi Konsep dan Operasional .....	37
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
A.	Desain Penelitian .....	40
B.	Populasi dan Sampel .....	42
C.	Instrumen Penelitian .....	44
D.	Prosedur Pengumpulan Data .....	44
E.	Metode Analisis Data .....	46
<b>BAB IV</b>	<b>TEMUAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A.	Temuan .....	47
B.	Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Yang Berpotensi Penerapan OVOP Dalam Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Sintang .....	77

C.	Model Kebijakan Penerapan OVOP Dalam Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Sintang .....	79
D.	Pembahasan .....	80
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>		
A.	Simpulan .....	91
B.	Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>98</b>
<b>LAMPIRAN</b>		
1.	Pedoman Observasi .....	102
2.	Pedoman Wawancara .....	103

UNIVERSITAS TERBUKA

## DAFTAR TABEL

4.1.	Luas Wilayah Kabupaten Sintang .....	49
4.2.	Keadaan Penduduk Kabupaten Sintang Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan .....	50
4.3.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang Menurut Sektor Tahun 2004-2008 (Persen) .....	51
4.4.	Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Golongan Umur Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Sintang .....	53
4.5.	Perkembangan Jumlah IKM Di Kabupaten Sintang Tahun 2006-2008 .....	58
4.6.	Jenis Usaha IKM Di Kabupaten Sintang Tahun 2006-2008 ....	60
4.7.	Jenis Usaha IKM Di Kabupaten Sintang Tahun 2006-2008 ....	61
4.8.	Jenis Usaha IKM Di Kabupaten Sintang Tahun 2006-2008 ....	61
4.9.	Jenis Usaha IKM Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Sintang Tahun 2006-2008 .....	62
4.10.	Prospek Penerapan OVOP Dalam Pengembangan IKM Berdasarkan Potensi Dukungan Ketersediaan Sumber Daya ...	65
4.11.	Prospek Penerapan OVOP Dalam Pengembangan IKM Berdasarkan Potensi Kebutuhan Pasar .....	68
4.12.	Prospek Penerapan OVOP Dalam Pengembangan IKM Berdasarkan Potensi Penciptaan Lapangan Kerja .....	70
4.13.	Prospek Penerapan OVOP Dalam Pengembangan IKM Berdasarkan Potensi <i>Multiplier Effect</i> .....	72
4.14.	Penilaian Responden Terhadap Locus/Tempat Penerapan OVOP Dalam Pengembangan IKM Di Kabupaten Sintang ....	74
4.15.	Identifikasi Jenis Produk Unggulan Guna Menerapkan OVOP Dalam Pengembangan IKM di Kabupaten Sintang .....	75
4.16.	Jenis Usaha IKM Di Kabupaten Sintang Tahun 2006-2008 ....	77
4.17.	Jenis Usaha IKM Di Kabupaten Sintang Tahun 2006-2008 ....	79
4.18.	Identitas SWOT Terhadap IKM di Kabupaten Sintang .....	81
4.19.	Identifikasi Jenis Produk Unggulan Guna Menerapkan OVOP Dalam Pengembangan IKM Di Kabupaten Sintang .....	82

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, yang diawali dengan krisis nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan krisis moneter telah mengakibatkan perekonomian Indonesia mengalami suatu resesi ekonomi yang besar. Krisis ini sangat berpengaruh negatif terhadap hampir semua lapisan atau golongan masyarakat dan hampir semua kegiatan-kegiatan ekonomi di dalam negeri, tidak terkecuali kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam skala kecil dan menengah.

Ditengah krisis yang terjadi, fenomena industri kecil dan menengah (IKM) telah tumbuh dan berkembang dengan cepat dari waktu ke waktu. Kelompok ini merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia. Keberadaan kelompok ini sangat strategis, karena selain mampu menyerap tenaga kerja yang relatif besar, memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan Produk Domestika Bruto, juga terbukti memiliki daya tahan terhadap krisis ekonomi yang terjadi. Oleh karena itu, upaya pengembangan industri kecil dan menengah perlu dikembangkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.

Dalam melihat peranan IKM, ada dua pertanyaan besar yang harus dijawab, *Pertama*, apakah IKM mampu menjadi mesin pertumbuhan sebagaimana diharapkan oleh gerakan IKM di dunia yang sudah terbukti berhasil di negara-negara maju, *Kedua*, apakah IKM mampu menjadi instrumen utama bagi pemulihan ekonomi

Indonesia yang sedang menghadapi krisis ekonomi, terutama memecahkan persoalan pengangguran dan kemiskinan. Tidak dapat dipungkiri bahwa harapan yang dibebankan kepada IKM sangat besar. Hal ini dikarenakan selain kinerjanya semasa krisis yang mengesankan, juga melihat prospek pangsa pasar yang relatif membesar diikuti oleh tumbuhnya usaha baru yang semakin beragam.

Negara Indonesia telah menempatkan pengembangan IKM sebagai salah satu kebijakan pokok pembangunan. Berbagai upaya pembinaan dan pengembangan IKM telah dan terus dilakukan, seperti bantuan modal usaha, pembinaan keterampilan, fasilitasi pengembangan kelembagaan, dan sebagainya telah dilakukan oleh berbagai departemen terkait. Departemen Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah misalnya, telah mengintrodusir beberapa program pemberdayaan IKM selama beberapa tahun terakhir ini. Pertama, klaster IKM untuk kategori IKM kerajinan dan barang seni, IKM batu mulia dan perhiasan, IKM gerabah/keramik hias, IKM garam rakyat, IKM minyak atsiri, dan IKM makanan ringan. Kedua, UPL (Unit Pendampingan Langsung) melalui penyiapan tenaga konsultan diagnosis (shindan) dan konsultan spesialis. Ketiga, beasiswa bagi lulusan terbaik SLTA di sekolah tinggi/akademika di bawah naungan Departemen Perindustrian untuk mencetak TPL (tenaga penyuluh lapangan). Keempat, GKM (Gugus Kendali Mutu) untuk peningkatan mutu kalangan perusahaan IKM, dan lain-lain.

Dalam pelaksanaan pengembangan kebijakan IKM di Indonesia selama ini secara umum telah dialami sukses dan kegagalan. Dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil Menengah 2002–2004 yang disusun oleh Departemen

Perindustrian Dan Perdagangan disebutkan beberapa evaluasi hasil pengamatan introspektif pengembangan kebijakan IKM sebagai berikut :

- a. Masih sering ditemui inkonsistensi di kalangan pembuat kebijakan, yaitu antara komitmen politik untuk mengembangkan UKM/IKM dengan langkah nyata di tataran program operasional dari berbagai pihak/otoritas terkait antara lain dukungan sumberdaya, prasarana/sarana penunjang, bantuan teknik, insentif, perlakuan kemudahan (fasilitasi), dan sebagainya.
- b. Banyak pola-pola bantuan teknik yang kurang efektif, antara lain karena penerapan pola umum tersebut secara atas-bawah (*top-down*) kurang mempertimbangkan aspek kelayakannya menurut kondisi spesifik obyek binaan di lapangan, serta kurang konsistennya dukungan sumberdaya dan lemahnya manajemen.
- c. Kurangnya pendekatan pemecahan masalah pengembangan secara komprehensif, dengan konsekwensi pentingnya keterpaduan dalam pelaksanaan.
- d. Belum efektifnya mekanisme bawah-atas (*bottom-up*) di lapangan.
- e. Banyak program pemberdayaan, khususnya kegiatan pendidikan dan pelatihan yang kurang memenuhi kebutuhan nyata dari obyek binaan di lapangan.
- f. Intervensi pemerintah, termasuk sistim insentif yang ada sering kali kurang menyentuh kebutuhan sektor riil. Pengembangan sistim insentif baru sering terkendala oleh cara pandang sempit dan kepentingan jangka pendek, serta kekhawatiran akan penyalahgunaan karena lemahnya aspek pengawasan.

- g. Masih adanya keengganan di sebagian masyarakat IKM untuk melakukan perubahan yang bersifat modernisasi dikarenakan oleh hambatan kultural dan tingkat pendidikan.
- h. Sering terlupakannya cara pendekatan rekayasa sosial (*social engineering*) dalam melakukan kegiatan transformasi sosial terhadap obyek binaan (IKM) di daerah.
- i. Kurangnya pola pikir konseptual-komprehensif dalam penyusunan program maupun pemecahan masalah, sehingga banyak langkah pembinaan kurang berhasil-guna.

Hasil evaluasi tersebut memberikan penegasan bahwa upaya pengembangan IKM perlu lebih ditingkatkan dengan melakukan berbagai perbaikan kinerja pada level kebijakan, implementasi maupun pengawasan program/kegiatan yang dicanangkan. Upaya perbaikan tersebut harus dijalankan oleh seluruh pihak secara sinergis, terutama antar jenjang pemerintahan. Dengan adanya kebijakan desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah yang riil, luas dan bertanggungjawab di era reformasi Indonesia memberikan peluang kepada setiap daerah ikut serta mengembangkan kebijakan IKM yang sesuai dengan kondisi daerahnya. Kebijakan otonomi daerah diharapkan dapat membantu upaya perbaikan kinerja pada level kebijakan, implementasi maupun pengawasan program/kegiatan IKM di daerah. Melalui Undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Kabupaten/Kota diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan

kewenangan yang ada, setiap daerah dapat memformulasikan kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat di daerahnya termasuk dalam pengembangan IKM.

Pengembangan IKM dalam konteks otonomi daerah menjadi penting karena salah satu urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang berskala kabupaten/kota adalah urusan perindustrian. Daerah otonom diharapkan dapat melaksanakan urusan tersebut sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah sehingga dapat memberikan nilai tambah yang optimal bagi perekonomian daerah. Pelaksanaan urusan perindustrian ini juga relevan dengan aturan yang telah dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian pada Pasal 3 ayat 7; berbunyi "tujuan Pembangunan Industri adalah mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah dalam rangka perwujudan wawasan nusantara". Selanjutnya disebutkan pada Pasal 7 ayat 1; berbunyi "Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan terhadap industri, untuk mewujudkan perkembangan industri yang lebih baik, secara sehat dan berhasil guna". Dari hal tersebut menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional Pasal 4 ayat 1 item a; berbunyi "Pemerintah dapat memberikan fasilitas kepada : industri prioritas tinggi, baik industri prioritas nasional maupun industri prioritas berdasarkan kompetensi inti industri daerah".

Kabupaten Sintang adalah daerah yang memiliki luas wilayah cukup besar, yaitu 21.365 km<sup>2</sup> dan kaya akan potensi sumber daya alam. Keberadaan lahan, hutan, air, bahan tambang dan sebagainya menjadi modal dasar bagi daerah ini membangun

masyarakat dan daerahnya sehingga tercipta kesejahteraan sosial yang tinggi. Upaya pengembangan potensi tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan industri kecil dan menengah yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Salah satu konsep yang cukup menarik untuk dikembangkan adalah *One Village One Product (OVOP)* pada kelompok industri kecil dan menengah di Kabupaten Sintang. OVOP merupakan program baru dari Pemerintah khususnya Departemen Perindustrian. OVOP yang dalam arti Indonesianya adalah Satu Desa Satu Produk yang merupakan adopsi konsep dari negara Jepang ini bertujuan untuk menggali dan mempromosikan produk inovatif dan kreatif berbasis sumber daya lokal yang bersifat unik, khas daerah, bernilai tambah tinggi, ramah lingkungan, serta memiliki citra dan daya saing internasional, dengan sasaran meningkatnya jumlah produk IKM yang memenuhi standar pasar global. Semangat pengembangan IKM dengan pendekatan OVOP juga dimaksudkan agar kegiatan pembinaan dapat dilaksanakan secara lebih terfokus pada wilayah tertentu. Sehingga hasil yang dicapai dari pembinaan tersebut terukur dan akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Jika merujuk pada kebijakan pengembangan industri nasional, konsep OVOP pada dasarnya merupakan wujud dari pelaksanaan program pengembangan kompetensi inti industri daerah. Yakni sebagai suatu pendekatan pengembangan potensi daerah (*regional development*) di satu wilayah dalam mendorong pengembangan suatu produk kelas global, yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan budaya lokal. Kebijakan baru ini tentu saja harus disambut gembira oleh pemerintah daerah dan kalangan pelaku usaha IKM khususnya serta semua pihak yang terkait. Kebijakan

ini harus dipahami sebagai suatu peluang bagi setiap daerah termasuk Kabupaten Sintang guna membangun ekonomi daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sebab secara substansial, konsep OVOP merupakan inovasi dari pengembangan produk sehingga dihasilkan peningkatan jumlah produk yang bernilai tinggi serta berdaya saing global.

Penerapan OVOP dalam pengembangan IKM menarik untuk diterapkan karena beberapa argumen, *Pertama*, Konsep ini memiliki pijakan yuridis yang jelas, yaitu Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/9/2007 tentang Peningkatan Efektivitas Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk di Sentra. *Kedua*; kenyataannya program semacam ini bisa sukses ketika diterapkan di sejumlah negara seperti di Thailand dan Filipina. Artinya, penerapan konsep ini sangat *feasible*. *Ketiga*; Sampai saat ini PDRB industri pengolahan sektor non swasta (*Industri Kecil dan Menengah*) 2003-2007 hanya mencapai 6,16%, padahal target RPJM Kabupaten Sintang 2006-2010 sebesar 10% sehingga belum adanya penguatan struktur industri yang signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Sintang. *Keempat*; Program OVOP terbukti mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah yang mengembangkannya (Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM).

Atas dasar pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji analisis pengembangan industri kecil dan menengah melalui konsep *One Village One Product* di Kabupaten Sintang.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan seperti diuraikan pada latar belakang masalah tersebut, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : " Bagaimana Prospek Penerapan *One Village One Product (Ovop)* Dalam Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Sintang.

Guna lebih memfokuskan perumusan masalah tersebut, dijabarkan ke dalam sub-sub masalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan *One Village One Product (Ovop)* dalam pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Sintang memiliki prospek yang baik?
2. Faktor-faktor apa yang saja berpotensi untuk mendukung dan menghambat penerapan *One Village One Product (Ovop)* dalam pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Sintang?
3. Model kebijakan seperti apa yang paling tepat untuk Penerapan *One Village One Product (Ovop)* dalam pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Sintang?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis prospek Penerapan *One Village One Product (Ovop)* Dalam Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Sintang.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor apa yang saja mendukung dan menghambat penerapan *One Village One Product (Ovop)* dalam pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Sintang.
3. Memformulasi model kebijakan yang paling tepat untuk penerapan *One Village One Product (Ovop)* dalam pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Sintang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah temuan ilmiah dalam studi kebijakan publik sehingga dapat menjadi bahan studi perbandingan terhadap pihak-pihak yang berminat terhadap tema yang serupa.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konstruktif terhadap berbagai pihak terkait seperti Pemerintah Daerah, Masyarakat dan pihak lainnya dalam kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah melalui *One Village One Product (OVOP)* Di Kabupaten Sintang

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teoritik**

##### **1. Formulasi Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan salah satu dimensi prima dalam ilmu administrasi negara (Thoha, 1993: 51). Dengan demikian, kebijakan publik pada dasarnya sebuah kajian utama/pokok yang masuk dalam lingkup disiplin ilmu administrasi negara. Batasan kebijakan publik telah banyak dikemukakan oleh para ahli, salah satunya adalah Hugh Heglo. Menurut Heglo (Abidin, 2002: 19), kebijakan publik adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk tujuan tertentu. Definisi Huglo ini kemudian diuraikan lebih lanjut oleh Jones (Abidin, 2002: 19), dalam kaitannya dengan beberapa isi dari kebijakan sebagai berikut, Pertama tujuan. Artinya, tujuan yang hendak dicapai, bukan sekedar diinginkan saja. Kedua; rencana, yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya. Ketiga; pogram yaitu cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan dimaksud. Keempat; keputusan, yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program. Kelima; dampak, yakni dampak yang timbul dari suatu program dalam masyarakat.

Merujuk pada pemahaman kebijakan tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat beberapa komponen pokok dalam konsep kebijakan publik, yakni tujuan, rencana,

program, keputusan dan dampak. Komponen-komponen tersebut saling berinteraksi secara intensif sehingga melahirkan suatu keputusan publik yang merupakan hasil kompromi seluruh aktor kebijakan yang terlibat.

Dalam studi kebijakan, salah satu aspek yang cukup penting untuk dipahami adalah proses kebijakan publik. Menurut Nicholas Hendry (Kismartini et al 2008: 1.38) mempelajari kebijakan publik juga dapat dilihat dari sudut proses. Artinya, dalam proses kebijakan publik akan diketahui bagaimana tahapan yang harus dilalui sehingga kebijakan tersebut tercipta dan membawa hasil yang diinginkan. Salah satu tahapan dalam proses kebijakan publik adalah formulasi kebijakan. Membuat atau merumuskan suatu kebijakan, apalagi kebijakan itu berupa peraturan/peraturan daerah, bukanlah suatu proses yang sederhana dan mudah. Hal ini disebabkan karena terdapat banyak faktor atau kekuatan-kekuatan yang berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan tersebut. Suatu kebijakan/peraturan dibuat bukan untuk kepentingan politis (misalnya guna mempertahankan status quo pembuatan keputusan) tetapi justru untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anggota masyarakat secara keseluruhan (Islamy, 1997: 22). Untuk memperjelas makna yang terkandung dalam perumusan kebijakan, Charles Lindblom (Wahab 1997: 16), menjelaskan bahwa pembuatan kebijakan negara (*public-policy-making*) itu pada hakekatnya merupakan proses politik yang amat kompleks dan analitis dimana tidak mengenal saat dimulai dan diakhiri, dan batas-batas dari proses itu sesungguhnya yang paling tidak pasti. Serangkaian kekuatan-kekuatan yang agak kompleks yang kita sebut sebagai pembuatan kebijakan negara itulah yang membuahkan hasil yang disebut kebijakan. Pada pemikiran yang

lain, Raymond Bouer (Wahab, 1997: 16) merumuskan pembuatan kebijakan negara sebagai proses transformasi atau pengubahan input-input politik menjadi output-output politik. Sedangkan Don K. Price (dalam Abdul Wahab, 1997:17), menyebutkan bahwa proses pembuatan kebijaksanaan yang bertanggung jawab ialah proses yang melibatkan interaksi antara kelompok-kelompok ilmuwan, pemimpin-pemimpin organisasi profesional, para administrator dan para politisi. Melalui proses pembuatan keputusanlah, komitmen-komitmen masyarakat yang acap kali masih kabur dan abstrak, sebagaimana nampak dalam nilai-nilai dan tujuan-tujuan masyarakat, diterjemahkan oleh para aktor (politik) ke dalam komitmen-komitmen yang lebih spesifik menjadi tindakan-tindakan dan tujuan-tujuan yang konkrit (Amitai Etzioni, dalam Wahab, 1997:17). Selanjutnya Chief J. O. Udoji (Wahab, 1997: 17) merumuskan pembuatan Kebijaksanaan negara sebagai:

Keseluruhan proses yang menyangkut pengartikulasian dan pendefinisian masalah, perumusan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dalam bentuk tuntutan-tuntutan politik, penyaluran tuntutan-tuntutan tersebut ke dalam sistem politik, pengupayaan pemberian sanksi-sanksi atau legitimasi dari arah tindakan yang dipilih, pengesahan dan pelaksanaan/implementasi, monitoring dan peninjauan kembali (umpan balik).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat dipahami bahwa perumusan kebijakan publik bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Dituntut berbagai pra kondisi yang harus dilakukan oleh aktor-aktor kebijakan publik agar perumusan kebijakan publik dapat berjalan lancar. Selain itu, siapa yang berpartisipasi dan apa

peranannya dalam proses tersebut untuk sebagian besar akan tergantung pada struktur pengambilan keputusan yang tersedia.

Adapun langkah-langkah perumusan kebijakan, menurut Islamy (1997: 77) adalah; (1) perumusan masalah kebijakan negara; (2) proses memasukkan masalah kebijakan negara ke dalam agenda pemerintah; (3) perumusan usulan kebijakan negara; (4) proses legitimasi kebijakan negara; (5) pelaksanaan kebijakan negara dan (6) penilaian kebijakan negara.

Proses perumusan kebijakan pada intinya adalah suatu tindakan dan interaksi dilingkungan *stakeholders* yang menghasilkan output dalam bentuk kebijakan. *Stakeholders* terdiri dari; *policy makers*, *programme sponsors*, *target participant*, *programme management* (koordinator program pada tingkat manejer), *programme staff* (mereka yang membantu di lapangan), *evaluators*, *programme competitors*, *contextual stakeholders* (orang-orang yang secara kontekstual berkepentingan) dan *evaluation community* (masyarakat yang berhubungan dengan kebijakan itu)

Untuk menggambarkan interaksi atau tindakan-tindakan dalam proses perumusan kebijakan publik terdapat sejumlah model. Pemahaman model disini lebih mengarah pada model konseptual. Model dapat diartikan sebagai bentuk abstraksi suatu kenyataan (Thoha, 1984:82). Menurut Thomas R. Dye (Wahab, 1990: 49) ada beberapa model pembuatan kebijakan yaitu (1) model kelembagaan, (2) model kelompok, (3) model elit, (4) model rasional, (5) model inkremental dan (6) model sistem. Kemudian Yehezkel Dror (Islamy 1997; 35) mengetengahkan tujuh macam

perumusan keputusan walaupun banyak persamaan dengan model yang dikembangkan R. Dye. Model menurut Dror yaitu (1) *Pure rationality model*, (2) *economically rational model*, (3) *sequential decision model*, (4) *incrementality model*, (5) *Satisfying model*, (6) *extrarational model*, (7) *optimal model*. Disamping itu masih ada beberapa macam pendekatan dari sudut hasil atau efek yaitu masing-masing model *rational comprehensive* dan model *mixed-scanning* (gabungan atau keputusan hibrida).

Dalam menentukan pilihan model yang akan dipakai, ada 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan menurut Nugroho (2002: 387) yaitu kompleksitas isu atau permasalahan dan ketersediaan sumber daya khususnya sumber daya manusia dan ketersediaan waktu. Dua hal ini akan sangat menentukan model mana yang akan diprioritaskan sebagai model kunci atau model utama.

## **2. Model kebijakan Dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat.**

Sejak tahun 1960, lahir sebuah konsep pemberdayaan masyarakat yang disebut *Community Development (CD)*. CD adalah sebuah proses pembangunan jejaring interaksi dalam rangka meningkatkan kapasitas dari sebuah komunitas, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan pengembangan kualitas hidup masyarakat (Lubis, 2006). CD adalah bekerja bersama masyarakat sehingga mereka dapat mendefinisikan dan menangani masalah, serta terbuka untuk menyatakan kepentingan-kepentingannya sendiri dalam proses pengambilan keputusan (*Standing Conference for Community Development, 2001*). Dalam konsep CD, masyarakat ditempatkan pada posisi pelaku

utama, sedangkan pemerintah daerah memosisikan sebagai fasilitator. Dengan demikian mengedepankan CD merupakan strategi yang mengsinergikan potensi dan sumber-sumber baik dalam SDM maupun SDA dari masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan. Oleh karena itu model pemberdayaan sebaiknya dikembangkan dan dirancang oleh pemerintah maupun masyarakat yang memiliki komitmen untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat yang lebih mandiri dalam aspek pemenuhan kebutuhan sosial dasar, ekonomi, budaya, agama, dan lingkungan (Dasuki, 2006).

Dalam pandangan Sulistiyani (2004; 24) pemikiran inovatif tentang bagaimana melakukan pendekatan pemberdayaan masyarakat dikaji dari beberapa perspektif. Pertama, tentang pentahapan pemberdayaan yang mencakup *knowledge, attitude and practice*, yang dijelaskan melalui indikator psikologis dan pendidikan yaitu meliputi aspek afektif, kognitif, psikomotorik dan konatif. Kedua, untuk melakukan pemberdayaan yang efektif hendaknya disertai dengan model membangun kapital yang tepat dengan memperhitungkan stratifikasi sosial. Model stratifikasi sosial feodal, transisional dan egaliter dapat menentukan proses aliran dana dan pengorganisasian kelompok pemberdayaan, dengan tekanan kekuasaan yang berbeda atau merata antar kelompok. Ketiga, peran agen pembaharu dalam pemberdayaan sangat penting. Untuk mengoptimalkan peran dan kontribusi mereka diperlukan pemberdayaan agen pembaharu.

Dalam pandangan Nur Effendi (2006) perubahan ke arah pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara dan menyangkut beberapa dimensi.

Dimensi yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan antara lain :

- a. Personal, mengembangkan kepekaan dan kepercayaan diri serta kemampuan untuk memunculkan sikap kesadaran dalam diri.
- b. Relasional, mengembangkan kemampuan untuk melakukan negosiasi dan mempengaruhi sifat saling hubungan dalam proses pengambilan keputusan.
- c. Kolektif, bekerja sama untuk mencapai tujuan yang dampaknya lebih luas (bermanfaat) dari pada dikerjakan sendiri. Mencakup keterlibatan dalam struktur politik tetapi juga mencakup tindakan kolektif yang didasarkan pada kerjasama daripada kompetisi.

Dalam konteks kebijakan publik, konsep pemberdayaan masyarakat harus dapat dijadikan rujukan dalam mengembangkan model-model kebijakan sehingga tercipta pola hubungan yang sinergis antara pemerintah dan *stakeholders* lainnya terutama masyarakat yang akan menjadi target group dari kebijakan yang disusun oleh pemerintah. Dalam pengembangan dan aktualisasi konsep pemberdayaan masyarakat di era otonomi daerah, model-model kebijakan berguna dan penting. Dimensi-dimensi yang paling penting dari model-model kebijakan adalah tujuan (deskriptif lawan normatif), bentuk ekspresi (verbal, simbolis, prosedural), dan asumsi-asumsi metodologis (pengganti lawan perspektif).

Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, terdapat beberapa model kebijakan yang dapat dikembangkan oleh pemerintah dilihat dari tingkatan peran dan kontribusi sumber daya. Adapun model kebijakan tersebut terbagi mejadi 3 model, yaitu ; model non intervensi, model intervensi, model kemitraan. Pada model non intervensi, peran dan kontribusi sumber daya dari pemerintah sangat rendah terhadap upaya pemberdayaan masyarakat. Pemerintah hanya mendorong dan memberikan motivasi kepada masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Model intervensi mengarah pada dominannya peran dan kontribusi sumber daya dari pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan hanya menerima apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah dan segala sumber daya yang diperlukan bersumber dari pemerintah. Sedangkan model kemitraan mengarah pada pembagian yang seimbang dan sekaligus sinergis dari peran dan kontribusi sumber daya antara pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah dan masyarakat saling berbagi tugas dan kewajiban yang proporsional baik peran maupun kontribusi sumber daya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

### **3. Pendekatan Perencanaan Pembangunan Wilayah**

Salah satu dimensi perencanaan yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pembangunan adalah perencanaan wilayah. Menurut Tarigan (2005: 32) perencanaan wilayah adalah perencanaan penggunaan ruang wilayah (termasuk pergerakan di dalam ruang wilayah) dan perencanaan kegiatan pada ruang wilayah

tersebut. Perencanaan wilayah sangat diperlukan karena memiliki beberapa arti penting seperti yang dijelaskan oleh Tarigan ((2005: 32) sebagai berikut :

- a. Banyak diantara potensi wilayah selain terbatas juga tidak mungkin lagi diperbanyak atau diperbaharui.
- b. Kemampuan teknologi dan cepatnya perubahan dalam kehidupan manusia.
- c. Keberadaan lahan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menopang kehidupannya.
- d. Tatanan wilayah yang ada pada dasarnya mempengaruhi kepribadian masyarakat.
- e. Potensi wilayah berupa pemberian alam maupun hasil karya manusia merupakan asset yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.

Dalam pelaksanaan perencanaan wilayah, terdapat dua pendekatan yang dipergunakan, yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan regional. Tujuan akhir dari dua pendekatan ini pada dasarnya sama, meskipun berbeda dalam fokusnya (Tarigan 2005: 35). Pendekatan sektoral memfokuskan diri pada pemahaman bahwa seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dikelompokkan atas sektor-sektor. Caranya adalah masing-masing sektor *dibreak down* ke dalam kelompok-kelompok yang dipilah menurut sifatnya. Masing-masing kelompok kemudian di bagi lagi menjadi subsektor-subsektor yang didalamnya memiliki komoditas tertentu. Dengan demikian, pendekatan sektor melihat perencanaan wilayah dengan basis pada pengembangan komoditas yang ada dalam suatu wilayah tertentu baik itu ruang wilayah bernama

kabupaten, kecamatan ataupun desa. Sedangkan pendekatan regional memfokuskan diri pada pemahaman bahwa kegiatan ekonomi dianalisis berdasarkan ketersediaan ruang (spasial). Dalam pendekatan regional selain fokus pada penggunaan ruang untuk kegiatan produksi/jasa juga memprediksi arah konsentrasi kegiatan serta memperkirakan kebutuhan fasilitas untuk masing-masing konsentrasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan rencana jaringan-jaringan penghubung sehingga berbagai konsentrasi dapat dihubungkan secara efisien.

#### 4. Konsep *One Village One product (OVOP)*

Konsep *One Village One product (OVOP)* pada dasarnya terkait dengan perencanaan wilayah dalam rangka pengembangan ekonomi suatu wilayah. OVOP menggunakan sinergi antara pendekatan sektoral dan pendekatan regional dalam pengembangan ekonomi suatu wilayah. Menurut sejarahnya, konsep OVOP dikembangkan oleh salah seorang gubernur di Jepang yaitu *Morihiko Hiramatsu* di tahun 1980-an. Munculnya konsep ini terkait dengan kondisi di tahun 1980-an bahwa secara nasional Jepang mengalami masa pertumbuhan yang pesat. Namun pertumbuhan itu terpusat di Tokyo, akibatnya terjadi kesenjangan dengan daerah kian meluas. Ada 3 Prinsip dalam OVOP. (1) lokal tetapi global. Jika budaya yang berciri khas lokal diasah, akan menjadi sesuatu yang dapat diandalkan secara global. Dengan menggali dan mengasah produk dan sumber daya yang dimiliki, akan menjadi komoditas yang dapat diandalkan di panggung internasional. (2) swadaya, mandiri, dan orisinalitas/integritas. Pada prinsipnya, OVOP merupakan gerakan swadaya yang

diprakarsai masyarakat. Apa yang dijadikan komoditas OVOP ditentukan oleh penduduk setempat. Pemerintah hanya memberi dukungan di bidang teknis dan mendorong pemasaran. (3) Pengembangan SDM, yaitu membina dan mengembangkan SDM yang dapat menghadapi tantangan baru di berbagai bidang.

Pengertian Satu Desa Satu Product atau *One Village One Product* seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perindustrian nomor: 78/M-IND/PER/9/2007 Tentang Peningkatan Efektifitas Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Melalui Pendekatan OVOP Di Sentra adalah suatu pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Satu desa sebagaimana dimaksud dapat diperluas menjadi kecamatan, kabupaten/kota, maupun kesatuan wilayah lainnya sesuai dengan potensi dan skala usaha secara ekonomis. Tujuan OVOP adalah untuk menggali dan mempromosikan produk inovatif dan kreatif lokal, dari sumber daya yang bersifat unik khas daerah, bernilai tambah tinggi, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, memiliki *image* dan daya saing yang tinggi.

Kriteria produk OVOP meliputi : 1. Produk unggulan daerah dan/atau produk kompetensi inti daerah; 2. Unik khas budaya dan keaslian lokal; 3. Berpotensi pasar domestik dan ekspor; 4. Bermutu dan berpenampilan baik; 5. Diproduksi secara kontinyu dan konsisten.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan untuk bisa mengurus dan memprioritaskan semua sektor di daerahnya

sebagai unggulan. Keterbatasan dukungan sumber daya finansial maupun kapasitas pelaksanaan birokrasi mengharuskan adanya suatu pilihan utama, dengan berbagai sektor lainnya sebagai pendukung. Oleh karena itu, pemilihan sektor unggulan menjadi penting, tidak semata-mata untuk tampil beda menurut ragam karakteristik daerah, tetapi terutama menjadi strategi akselerasi pembangunan lokal itu sendiri.

Dalam pemahaman Robert Endi Jaweng (2007) dalam identifikasi sektor unggulan daerah yang berbasis OVOP terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Keterkaitannya dengan *stage of development* suatu daerah. Sektor unggulan harus sesuai dan menjadi bagian dari struktur perekonomian yang ada, yakni produksi primer, industrialisasi dan jasa/perdagangan. Mengunggulkan sektor kehutanan di daerah jasa pariwisata seperti Bali, misalnya, jelas menunjukkan diskoneksi yang berlebihan.
- b. Keterkaitan antarsektor. Sektor unggulan yang memiliki keterkaitan tinggi dengan sektor lain, baik sektor hilir atau penyedia *input* (*backward linkages*) maupun sektor hulu atau pemakai *output* (*forward linkages*) akan berpeluang besar mendinamisasi perekonomian secara keseluruhan. Perkembangan dalam sektor unggulan akan menarik dan mendorong gerak maju pada sektor lainnya.
- c. Menyumbang nilai tambah tinggi dalam sektor atau bahkan dalam struktur ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian sektor unggulan menjadi *prime mover* untuk pertumbuhan ekonomi.

- d. Menyerap tenaga kerja banyak yang bisa membuka peluang dan lapangan kerja bagi penduduk setempat.
- e. Daya dukung SDM dan teknologi, terutama untuk sektor industri yang membutuhkan suplai dan kualitas memadai.
- f. Pertimbangan strategis non ekonomi, seperti konteks budaya, misi keamanan, atau kebijakan negara, seperti kebijakan penetapan beras sebagai pangan nasional di Indonesia sehingga hampir semua daerah menanam padi.

### **5. Industri Kecil Dan Memengah**

Perubahan tatanan perekonomian dunia ditandai oleh globalisasi yang tidak lagi mengenal batas wilayah atau negara dan munculnya kecenderungan pembentukan preferensi perdagangan antar negara sekawasan. Pada era globalisasi yang sedang bergulir, tentu akan menimbulkan berbagai konsekuensi dari dunia usaha termasuk dunia industri. Dalam era pasar bebas, tidak satupun negara yang mampu menghentikan lajunya arus barang dan jasa dari manca negara ke pasar domestik. Indonesia sebagai negara dengan penduduk kelima terbesar di dunia, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (sebelum krisis), pasti akan menjadi alternatif pasar yang menarik bagi barang dan jasa negara-negara maju maupun kawasan Asia sendiri.

Khususnya di dunia industri, hal ini memberikan konsekuensi logis bahwa produk industri harus mempunyai keunggulan kompetitif sekaligus komparatif

untuk dapat ikut bersaing dengan produk luar negeri, baik di pasar domestik maupun luar negeri. Sebaliknya apabila produk industri tidak mempunyai keunggulan-keunggulan seperti tersebut diatas, lambat atau cepat dunia usaha industri akan tergilas oleh globalisasi tersebut.

Para ekonom menyebutkan adanya lima keadaan yang memungkinkan industri kecil bertahan terhadap persaingan yang datang dari industri besar (*World Bank Staff Working Paper*, dalam Nurhajati, 2003). *Pertama*, industri kecil tersebut bergerak dalam pasar yang terpecah-pecah (*fragmented market*). Dalam pasar yang demikian, fenomena skala ekonomi tidak terlalu penting, sehingga keuntungan yang diperoleh dari skala usaha tidaklah menonjol. Pasar semacam ini memiliki segmen-segmen konsumen yang sangat bervariasi. *Kedua*, industri kecil menghasilkan produk-produk dengan karakteristik elastisitas pendapatan negatif, artinya jika terjadi kenaikan pendapatan masyarakat, permintaan terhadap produk-produk tersebut cenderung turun, bukan sebaliknya. *Ketiga*, industri kecil mempunyai tingkat heterogenitas teknologi yang bisa digunakan. Dengan heterogenitas teknologi yang ada, usaha kecil dapat menghasilkan produk yang merupakan salah satu determinan terpenting untuk kelangsungan hidup usaha kecil. *Keempat*, industri kecil tergabung dalam suatu aglomerasi sehingga mampu memanfaatkan efisiensi kolektif, misalnya dalam pembelian bahan baku, pemanfaatan tenaga kerja terampil dan dalam hal pemasaran. *Kelima*, industri kecil diuntungkan oleh kondisi geografis, yang membuat produk-

produk usaha kecil memperoleh proteksi alami karena pasar yang dilayani tidak terjangkau oleh inovasi produk-produk usaha berskala besar.

Setidaknya terdapat tiga alasan yang mendasari negara berkembang belakangan ini memandang penting keberadaan IKM (Berry, et al, dalam Barata, 2003). *Pertama* karena kinerja IKM cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. *Kedua*, sebagai bagian dari dinamikanya, IKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. *Ketiga*, karena diyakini bahwa IKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas daripada usaha besar. Kuncoro (dalam Barata, 2003) juga menyebutkan bahwa industri kecil dan menengah di Indonesia telah memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha dan mendukung pendapatan rumah tangga.

Konsep industri seperti yang ditegaskan dalam Peraturan Menteri Perindustrian nomor: 78/M-IND/PER/9/2007 adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa lingkup dari kegiatan industri mencakup 3 hal besar, yaitu pengolahan bahan menjadi memiliki nilai lebih tinggi, rancang bangun dan perekayasaan industri.

Dilihat dari tingkatannya, terdapat industri kecil dan industri menengah. Menurut Peraturan Menteri Perindustrian nomor: 78/M-IND/PER/9/2007 yang

dimaksud dengan industri kecil adalah kegiatan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan yang dimaksud dengan industri menengah adalah kegiatan industri dengan nilai investasi perusahaan di atas Rp. 200.000.000, sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Adapun industri Kecil pada dasarnya masuk dalam kategori batasan usaha kecil. Menurut Undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Industri Kecil didefinisikan sebagai "Industri Kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah-tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperniagakan secara komersial, yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta, dan mempunyai nilai penjualan per tahun sebesar Rp.1 milyar atau kurang. Klasifikasi batasan mengenai skala usaha menurut BPS yaitu :

1. Industri dan Dagang Mikro (ID-Mikro) : 1 – 4 orang
2. Industri dan Dagang Kecil (ID-Kecil) : 5 – 19 orang.
3. Industri dan Dagang Menengah : 20 – 99 orang.
4. Industri dan Dagang Besar (ID-Besar) : 100 orang ke atas.

Sebagai suatu bagian dari kegiatan ekonomi, IKM perlu dianalisis terkait dengan aspek yang melingkupinya. Dengan merujuk pada konsep Rencana Induk

Pengembangan Industri Kecil Menengah 2002–2004 dapat dijelaskan analisis berbagai aspek mempengaruhi IKM sebagai berikut :

**a. Kekuatan**

- 1) IKM merupakan segmen industri yang dapat dijadikan wahana (medium) dan tumpuan utama yang paling menjanjikan bagi penciptaan wirausaha baru, karena merupakan tataran terdekat yang dapat dijangkau oleh masyarakat yang baru memulai berwirausaha.
- 2) IKM mempunyai karakteristik keluasan daya tampung yang besar bagi perwujudan aspirasi ekonomis bagi masyarakat luas untuk memperoleh penghidupan, khususnya yang tergolong berpendapatan rendah dan menengah.
- 3) IKM mempunyai fleksibilitas dan ketahanan yang tinggi dalam mengantisipasi dan menyesuaikan diri terhadap dinamika perubahan/perkembangan pasar, karena diuntungkan oleh dominannya tumpuan pasar domestik (khususnya produk-produk barang konsumsi tradisional), serta kuatnya akar pada penggunaan input sumberdaya dalam negeri.
- 4) Tidak gampang ditembusnya pasar domestik oleh produk-produk sejenis dari impor (*barriers to entry* secara alamiah cukup kuat) karena tingkat kecanggihan teknologi yang digunakan rendah (teknologi sederhana sampai madya) dan tidak memerlukan ketrampilan yang tinggi.

**b. Kelemahan****1) Kelemahan Utama**

- a. Produk-produk IKM kebanyakan masih belum mempunyai daya tembus ke pasar dunia/ekspor.
- b. SDM yang terlibat dalam usaha IKM belum banyak yang berkualifikasi andal dan profesional, utamanya pula di bidang kewirausahaan. Pengusaha-pengusaha IKM pada umumnya masih belum mampu memenuhi permintaan pasar yang menuntut kestabilan mutu, jumlah pesanan yang besar, *delivery* cepat dan tepat waktu.
- c. Penguasaan teknologi produksi dan produk serta wawasan orientasi mutu pada sebagian besar pelaku IKM masih terbatas dan belum maju, termasuk daya inovasinya. Teknologi produksi yang digunakan kebanyakan masih tergolong sederhana/tradisional.
- d. Kemampuan dan agresivitas mengakses pasar para pengusaha IKM masih terbatas.
- e. Kemampuan permodalan masih terbatas, dan kemampuan mengakses sumber-sumber dana/permodalan juga terbatas, antara lain tertumbuk masalah kolateral, biaya konsultasi, biaya promosi penjualan (pameran, brosur, biaya pengujian mutu, pengiriman sampel dsb.), yang diperparah pula dengan belum konsistennya keberpihakan sektor keuangan dan perbankan kepada pengembangan IKM.

## 2) Kelemahan Lain

- a. Masih terbatasnya institusi pemasaran yang efektif dan fasilitas pendukung lain bagi produk-produk IKM.
- b. Masih terbatasnya penggunaan teknologi informasi untuk mendinamisasi dan memajukan IKM.
- c. Masih belum meluasnya wawasan dan pengetahuan mengenai HaKI, sehingga para pelaku IKM belum terobsesi untuk melakukan inovasi teknologi dan sistem manajemen untuk membangun keunggulan kompetitif.
- d. Belum terwujudnya komitmen, konsistensi kebijakan dan semangat keterpaduan berbagai pihak/pembuat keputusan kebijakan dalam pengembangan IKM.
- e. Belum satunya persepsi mengenai batasan IKM/UKM di berbagai instansi dan masyarakat.

## c. Peluang

- 1) Tingginya dukungan politis dan komitmen pemerintah dan masyarakat untuk dikembangkannya IKM.
- 2) Masih potensialnya ketersediaan sumberdaya alam dan kekayaan seni budaya tradisional di tiap daerah yang belum didayagunakan secara optimal untuk mengembangkan IKM.
- 3) Tersedianya SDM angkatan kerja dalam jumlah besar yang masih belum terdayagunakan secara produktif.

- 4) Potensialnya peluang pasar di dalam negeri yang kebutuhannya akan produk-produk barang hasil IKM masih belum terpenuhi.
- 5) Akan lebih terbuka luasnya peluang pasar ekspor, paling tidak akan lebih mudahnya akses pasar ke kawasan Asia Tenggara dalam rangka AFTA, serta ekspor ke kawasan non-ASEAN lainnya.
- 6) Munculnya teknologi baru di bidang informasi dan komunikasi (ICT) yang sangat menunjang dinamisasi kegiatan bisnis, termasuk menunjang kemampuan untuk akses pasar secara cepat.

#### d. Ancaman

- 1) Persaingan dari produk-produk IKM yang berasal dari impor akan semakin tajam sebagai akibat dari semakin terbukanya lalu lintas perdagangan lintas batas sebagai konsekwensi dari globalisasi dan liberalisasi ekonomi, sebagaimana dihadapi sesuai dengan komitmen terhadap ketentuan WTO. Ancaman terdekat apabila kurang siap adalah pasar bebas ASEAN (AFTA).
- 2) Kelemahan pengaturan dan penegakan hukum dapat mengancam semakin terdesaknya IKM oleh usaha besar yang secara agresif dapat memasuki wilayah usaha yang sepatutnya diperuntukkan bagi UKM.
- 3) Masih rendahnya tingkat kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan keandalan produk-produk IKM dalam negeri.
- 4) Kekurangmampuan IKM memenuhi tuntutan konsumen akan mutu produk yang semakin tinggi, yang pada umumnya dibandingkan dengan mutu produk sejenis dari buatan luar negeri.

## **e. Hambatan dan Tantangan**

### **1) Hambatan**

Selain hambatan intern berupa kelemahan, hambatan ekstern bagi pelaku IKM yang perlu dikemukakan antara lain adalah :

- a) Sulitnya memperoleh pendanaan usaha, sebagai akibat dari persyaratan perbankan yang kebanyakan sulit dipenuhi oleh pengusaha IKM serta mekanisme penjaminan kredit yang belum berjalan baik. Di samping itu perusahaan-perusahaan perbankan sebagai unit usaha menanggung risiko terlalu besar tanpa ikut ditanggung oleh pemerintah.
- b) Belum meluasnya sikap keberpihakan konsumen dalam negeri untuk lebih memilih produk dalam negeri.
- c) Banyak aparat pemerintah lebih melancarkan urusan perusahaan besar daripada perusahaan IKM.
- d) Belum meluasnya dukungan infrastruktur yang memadai bagi sentra-sentra produksi IKM (lahan/kawasan industri, jalan akses, listrik, komunikasi, pengolahan limbah, laboratorium pengujian mutu, dsb).
- e) Ketentuan di negara tujuan ekspor sering menyulitkan pengeksport produk IKM.
- f) Belum lengkapnya pengaturan oleh pemerintah yang menunjang, memudahkan, meringankan dan memperlancar urusan pengusaha IKM, antara lain sistim insentif, tarif-tarif khusus, persyaratan-persyaratan lebih mudah,

subsidi dan bantuan teknik, perlindungan terhadap kecurangan pengusaha besar.

- g) Belum tertanamnya secara meluas sikap kepedulian, kemitraan dan solidaritas sosial dari pengusaha besar terhadap para pelaku IKM.
- h) Belum satunya visi dan sikap serta keterpaduan penanganan pembinaan IKM dari pihak pemerintah.

## 2) Tantangan

Dalam cara pandang dan sikap positif, keseluruhan kekuatan yang belum terdayagunakan secara optimal, kelemahan yang harus diatasi, peluang (khususnya yang belum tercapai), ancaman dan hambatan yang dihadapi, pada hakekatnya keseluruhannya merupakan tantangan bagi IKM dan aparat pembina untuk diatasi bersama dengan dukungan seluruh institusi terkait.

Dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil Menengah 2002–2004 yang disusun Departemen Perindustrian ditetapkan beberapa Kebijakan Pengembangan IKM sebagai berikut :

- a) Menggariskan prioritas sektoral pengembangan IKM melalui pemilihan jenis-jenis industri yang dijadikan fokus pengembangan, untuk dijadikan acuan prioritas bagi aparat pembina secara terpadu/lintas instansi, baik di pusat maupun di daerah, di mana pilihan jenis industri dan komoditi yang akan dikembangkan disesuaikan dengan kecocokan potensi dan prospek tumbuh di daerah pengembangan yang bersangkutan, dengan mengutamakan pengembangan ke daerah luar Pulau Jawa, khususnya daerah terpencil, wilayah perbatasan dan KTI.

- b) Melakukan kegiatan pemberdayaan agar para pelaku IKM mempunyai wawasan dan jiwa wirausaha yang ulet, patriotik (cinta produk dalam negeri), dan profesional, mampu mengidentifikasi, mengembangkan ataupun memanfaatkan peluang usaha, mampu mendayagunakan sumberdaya produktif dan mengakses pasar (lokal, dalam negeri maupun ekspor), mempunyai kemampuan manajemen usaha, keahlian dan ketrampilan teknis/teknologis, mampu membangun daya saing (berwawasan efisiensi, produktivitas dan mutu, proaktif-kreatif- inovatif), pemberdayaan terhadap institusi yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas manajemen.
- c) Mengembangkan iklim usaha yang lebih mendorong, melindungi dan memberikan keleluasaan lebih besar kepada para pebisnis IKM untuk tumbuh berkembang maju.
- d) Meningkatkan pemberian layanan prima (fasilitasi) kepada pelaku IKM, baik layanan administratif (perijinan/pencatatan/legalisasi/ketetapan fasilitas/rekomendasi, informasi kebijakan, dsb), maupun layanan bisnis berupa informasi bisnis yang diperlukan (pasar, peluang usaha, teknologi, permodalan, mitra-usaha, dsb.) maupun sistim dan sarana penunjang yang dapat mendinamisasi dan memajukan daya saingnya (utamanya dengan mensosialisasikan penggunaan teknologi informasi yang mutakhir).
- e) Selalu mengembangkan program yang inovatif, realistik dan membumi menyentuh kepentingan pelaku pasar di sektor riil, mampu menjawab masalah aktual yang dihadapi sesuai kondisi nyata obyek binaan di lapangan

Dengan berlandaskan kepada semangat untuk menumbuhkan ekonomi yang berciri kerakyatan, serta demi untuk menghemat sumberdaya pembangunan yang terbatas, pengembangan IKM ditempuh dengan memilih sektor-sektor atau kelompok industri pilihan yang diprioritaskan sebagai penghela pertumbuhan IKM, atau diistilahkan sebagai fokus pengembangan, yaitu : Kelompok IKM Penggerak Ekonomi Daerah, Kelompok IKM Pendukung, Kelompok IKM Berorientasi Ekspor dan Kelompok IKM Inisiatif Baru (*knowledge-based*). Jenis-jenis industri yang tercakup dalam setiap kelompok industri tersebut dapat berkembang maupun dapat disesuaikan menurut kebutuhan pembangunan, tingkat perkembangan industri dan teknologi, serta dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah. Adapun kriteria yang digunakan sebagai dasar untuk memilih sektor-sektor prioritas atau dijadikan fokus pengembangan adalah :

- (1) Ketersediaan bahan baku di dalam negeri.
- (2) Tingkat dan jenis ketrampilan yang diperlukan sudah ada di dalam negeri.
- (3) Tersedia dan terbukanya pasar.
- (4) Komoditas/produk mempunyai prospek dipasarkan meskipun pada waktu ini produksinya belum berkembang.
- (5) Membutuhkan banyak tenaga kerja.
- (6) Menunjang daerah terbelakang yang akan dikembangkan, khususnya daerah terpencil, daerah perbatasan dan KTI.
- (7) Terkait dengan upaya pelestarian seni budaya daerah.

Kondisi IKM hingga kini masih sarat dengan berbagai permasalahan baik internal maupun eksternal. Masalah internal antara lain soal permodalan, teknologi, manajemen, keterampilan SDM termasuk lemah mengakses pasar. Sedangkan masalah eksternal antara lain lemah posisi tawar (*bargaining position*), dan lemah bersaing (*competitiveness*) dengan produk perusahaan besar maupun produk impor (Dhorifi Zumar, 2007). Oleh karena itu, untuk tidak mengulangi kisah kegagalan (*failure story*), maka menurut Dhorifi Zumar (2007) program pengembangan IKM dengan konsep OVOP ini perlu dilakukan dengan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

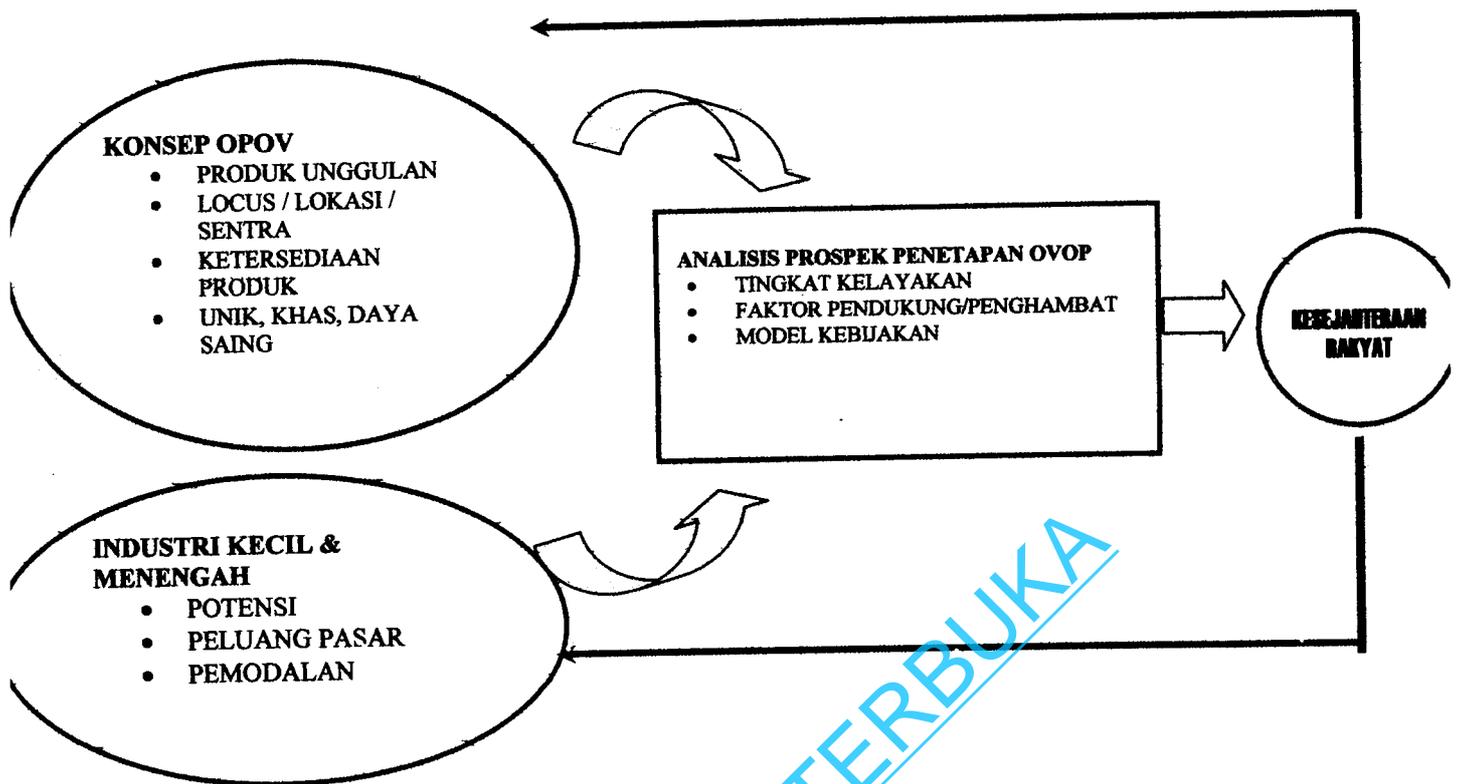
- (1) Perlu adanya komitmen yang kuat dan kerjasama yang sinergis dari semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta maupun masyarakat setempat, untuk menyukseskan program OVOP. Jangan sampai program ini hanya semangat di awal tapi luntur belakangan.
- (2) Karena titik lemah IKM rata-rata pada faktor promosi dan pemasaran, maka dua hal ini harus menjadi perhatian yang ekstra bagi semua pihak. Berikan fasilitas pada mereka untuk mengikuti berbagai *event* promosi dan pemasaran, seperti pameran, temu bisnis dan lain-lain.
- (3) Program pendampingan langsung harus terus diintensifkan. Para konsultan diagnosis maupun konsultan spesialis/profesional harus gesit dan mau jemput bola untuk mencarikan solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi pengusaha IKM di daerahnya. Kiprah Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) pun perlu digalakkan.

- (4) Menyangkut urusan permodalan bagi IKM, aparat pemerintah pusat maupun daerah harus menjadi mediator dengan pihak-pihak perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya. Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berjumlah Rp 14,5 triliun bagi UMKM dan Koperasi yang telah diluncurkan pemerintah saat ini harus mampu dimanfaatkan sebesar mungkin bagi kalangan IKM agar tidak salah sasaran.
- (5) Tidak kalah pentingnya adalah peningkatan SDM, kemampuan manajemen, kreativitas desain dan penguasaan teknologi tepat guna. Pelaku IKM harus didorong terus untuk memiliki dan menguasai hal-hal di atas.

#### **B. Kerangka Berfikir**

Kerangka Berpikir mengenai Prospek Penerapan *One Village One Product* (OVOP) Dalam Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Sintang, sebagai berikut :

UNIVERSITAS TERBUKA



**Gambara : 1 Kerangka Pikir Penelitian**

Berdasarkan kerangka pikir penelitian seperti terlihat pada gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa untuk dapat mengembangkan pembangunan daerah yang berbasis lokal dan sesuai dengan aspirasi masyarakat lokal, terdapat suatu konsep yang disebut dengan *One village One Product* (OVOP). Konsep OVOP ini merupakan suatu pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

2. Disaat yang sama, di Kabupaten Sintang telah tumbuh dan berkembang usaha industri kecil dan menengah yang memiliki potensi, peluang pasar dan permodalan yang selama ini berkembang secara sporadis dan kurang optimal.
3. Guna mengembangkan usaha IKM sehingga dapat menjadi penopang pengembangan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan untuk melihat prospek penerapan OVOP dalam pengembangan IKM di Kabupaten Sintang. Dalam upaya tersebut terdapat menjadi menarik untuk melihat prospek penerapan OVOP terhadap pengembangan IKM dengan analisis pada 3 (tiga) aspek, yaitu tingkat kelayakan, faktor yang berpeluang untuk mendukung dan menghambat jika hal tersebut diterapkan dan model kebijakan yang paling efektif dalam penerapannya. Analisis prospek yang diarahkan pada 3 aspek tersebut pada gilirannya diarahkan untuk mencapai tujuan pokok yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **C. Definisi Konsep & Operasional**

Adapun definisi konsep dan definisi operasional dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konsep *One Village One Product (OVOP)* adalah pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Sedangkan definisi operasional OVOP adalah suatu wilayah tertentu, baik skala

administratif berupa kabupaten, kecamatan ataupun desa memiliki satu komoditas unggulan yang sesuai dengan potensi wilayah yang ada.

2. Faktor jenis produk adalah berbagai atau keanekaragaman produk IKM yang berpotensi untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Sintang. Sedangkan definisi operasional jenis produk adalah jenis produk IKM di suatu wilayah seperti tenun ikat, pandai besi, keripik pisang, dsb.
3. Faktor Segmentasi pasar adalah ketersediaan dan klasifikasi pasar yang dibutuhkan untuk menjual produk unggulan pada industri kecil dan menengah di Kabupaten Sintang. Sedangkan definisi operasional Segmentasi pasar yaitu jumlah dan lokasi pasar untuk menampung dan memasarkan hasil IKM.
4. Faktor modal adalah kekayaan finansial yang dimiliki individu atau kelompok masyarakat terutama dalam penggunaan awal untuk melaksanakan usaha IKM di Kabupaten Sintang. Sedangkan definisi operasional modal adalah kepemilikan jumlah finansial untuk mendukung pengembangan IKM.
5. Faktor teknologi adalah sistem pengetahuan yang dimiliki atau diadopsi serta pengembangan/aplikasi dari alat, mesin atau material guna mengembangkan IKM di Kabupaten Sintang. Sedangkan definisi operasional yaitu jumlah dan jenis teknologi yang dipergunakan dalam pengembangan IKM di Kabupaten Sintang.
6. Faktor kelembagaan sosial adalah organisasi yang dibentuk dan dimiliki oleh sekelompok masyarakat dalam pengembangan usaha IKM di Kabupaten Sintang.

Sintang. Sedangkan definisi operasional kelembagaan sosial adalah keberadaan dan jumlah organisasi sosial dalam kegiatan IKM.

7. Model kebijakan adalah format dan mekanisme kebijakan yang dikembangkan dalam penerapan OVOP dalam pengembangan IKM di Kabupaten Sintang. Sedangkan definisi operasional model kebijakan yaitu pilihan terhadap model non intervensi, model intervensi dan kemitraan dalam penerapan OVOP untuk pengembangan IKM di Kabupaten Sintang

UNIVERSITAS TERBUKA

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Sesuai dengan tujuannya, penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif. Yang dimaksud dengan desain penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan fakta dan data yang ada dengan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat serta hubungannya antar fakta dan data apa adanya. Sebagaimana dikemukakan Nawawi, (1987 : 63) bahwa metode deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian seseorang, lembaga dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Azwar (1998 : 7) menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu serta berusaha menggambarkan situasi atau kejadian yang nyata. Berdasarkan pendapat ahli tersebut, maka penulis berpendapat bahwa penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang akan melukiskan keadaan obyek atau peristiwa sesuai dengan fakta dan data yang ada di lapangan.

Sebagai penelitian deskriptif, penelitian ini dilakukan tidak hanya terbatas kepada pengumpulan data semata-mata, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi

dari data, informasi dan fakta. Analisis dan interpretasi ini merupakan penuturan (uraian) melalui pengklasifikasian, perbandingan-perbandingan dan sebagainya dalam upaya menarik kesimpulan-kesimpulan.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif sesuai dengan pendapat Huberman dan Miles (1992 : 47) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan dalam menganalisis fenomena/fakta dengan cara membandingkan, mereplikasi, mengkategorikan, mengklasifikasi, menyajikan dan melaksanakan verifikasi data, yang secara keseluruhan bertujuan untuk menemukan keseragaman pola dan sifat umum sesuatu yang diteliti. Senada dengan pendapat Furhan (1982 : 21) menyatakan metode pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ungkapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri. Pendekatan ini langsung menunjukkan setting dan individu-individu dalam setting itu secara keseluruhan, subyek penyelidikan, baik berupa organisasi ataupun individu.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Bodgan dan Tylor (dalam Moleong, 2000: 3) bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selaras juga dengan pendapat Strauss dan Corbin (2003 : 4) yang mengatakan penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

Jadi penelitian kualitatif yang dimaksud adalah penelitian yang dalam pemecahan masalah tidak menggunakan statistik.

Dengan pendekatan kualitatif tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang *reliable* langsung pada obyek di lokasi penelitian guna mendapatkan data dan fakta yang relevan dengan masalah yang diteliti serta menganalisis secara sistematis untuk dapat diambil suatu kesimpulan.

## **B. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2005 : 72). Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2005 : 73).

Dengan pengertian diatas, maka Populasi penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya formulasi kebijakan penerapan OVOP pada pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Sintang. Pihak-pihak dimaksud yaitu dari DPRD khususnya komisi yang membidangi pengembangan industri, dari pemerintah daerah, yaitu Bupati dan Wakil Bupati Sintang, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Para Camat Dan Kepala Desa serta dari Pihak Masyarakat yaitu tokoh masyarakat dan pelaku industri kecil dan menengah Adapun tehnik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *purposif sampling* dan *snowball sampling*.

Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Lembaga	Jumlah Sampel
1.	DPRD	3 orang
2.	Pemerintah daerah	
	Bupati	1 orang
	Wakil Bupati	1 orang
	Kepala Bappeda	1 orang
	Kadis Perindag	1 orang
	Camat	14 orang
	Kepala Desa	10 orang
3.	Universitas Kapuas	1 orang
4.	Tokoh Masyarakat	5 orang
5.	Pelaku IKM	10 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>46 orang</b>

Adapun dasar penetapan sampel tersebut yaitu selain pihak-pihak tersebut mengetahui topik penelitian karena terlibat secara langsung dalam pengembangan industri kecil dan menengah, juga merupakan aktor kebijakan baik dalam sistem formal maupun sistem informal yang mempengaruhi kemungkinan formulasi kebijakan penerapan OVOP dalam pengembangan Industri Kecil Dan Menengah di Kabupaten Sintang.

### C. Instrumen Penelitian

Data yang ingin dijangkau dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan upaya penerapan OVOP dalam pengembangan IKM di Kabupaten Sintang. Data primer diperoleh melalui pedoman wawancara yang terstruktur, diskusi kelompok yang terfokus atau *Focus Group Discussion* (FGD) dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelaahan terhadap dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan fokus penelitian.

### D. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pada tahap awal, peneliti mengumpulkan data sekunder, yaitu mencari dan mengumpulkan berbagai dokumen resmi yang berhubungan dengan fokus penelitian. Setelah diperoleh dokumen resmi, maka peneliti mengkaji dan menelaahnya yang disesuaikan dengan kepentingan penelitian melalui teknik dokumentasi yang berlaku.
- b. Tahap selanjutnya, dengan bekal data sekunder yang telah diperoleh, peneliti mengumpulkan data primer dengan cara mengamati (observasi) kondisi di lapangan, dalam hal ini peneliti mengunjungi kecamatan dan desa untuk melihat secara langsung potensi wilayah kecamatan dan desa di Kabupaten Sintang. Pengamatan ini diperlukan dalam upaya menggali informasi tentang

prospek penerapan OVIP dalam pengembangan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Sintang.

- c. Tahap berikutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan, yaitu Para Camat, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan Pelaku Industri Kecil Dan Menengah di Kabupaten Sintang untuk menggali informasi tentang faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan konsep OVOP dalam pengembangan IKM di Kabupaten Sintang. Wawancara yang dilakukan peneliti melalui pedoman wawancara yang terstruktur dan bersifat terbuka. Sebagai tambahan data yang diperlukan, peneliti akan melakukan FGD ke beberapa informan kunci yaitu Kepala Bappeda dan kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta sebagian pelaku industri kecil dan menengah untuk menggali informasi tambahan tentang faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan konsep OVOP dalam pengembangan IKM di Kabupaten Sintang.
- d. Dalam rangka menggali informasi tentang model kebijakan penerapan OVOP dalam pengembangan IKM di Kabupaten Sintang, peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan pihak *policy maker* seperti DPRD, Bupati dan Wakil Bupati serta Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sintang.
- e. Guna mendapatkan informasi yang relevan, mendalam dan komprehensif, peneliti kemudian melakukan *cross cek* (penilaian silang) terhadap data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder dari hasil analisis dokumen

resmi, observasi, wawancara maupun Focus Discussion Group (FDG) yang telah dilakukan.

#### **E. Metode Analisis Data**

Dengan jenis penelitian diskriptif kualitatif, maka pengolahan data dengan menggunakan analisis data yang lazim untuk penelitian kualitatif. Analisa data tersebut dijelaskan dalam tahapan sebagai berikut :

- a. Reduksi Data, yaitu proses mengidentifikasi data dengan mengurangi data yang tidak diperlukan dengan kaitan fokus penelitian.
- b. Classifying Data, yaitu proses pengorganisasian atau pengelompokan data yang sama dengan format grafik, tabel-tabel dan sejenisnya
- c. Interpretasi data, yaitu proses pembuatan keputusan dan penyusunan kesimpulan dengan penafsiran yang berkaitan pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian untuk menemukan kecenderungan dan memberikan penjelasan pada aspek-aspek tertentu secara jelas dan tegas yang akan menuntun peneliti pada langkah selanjutnya.

UNIVERSITAS TERBUKA

## BAB IV

### TEMUAN DAN PEMBAHASAN

#### A. TEMUAN

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Sintang

Kabupaten Sintang terletak di bagian timur Provinsi Kalimantan Barat atau di antara 1°05' Lintang Utara serta 0°46' Lintang Selatan dan 110°50' Bujur Timur serta 113°20' Bujur Timur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wilayah Kabupaten Sintang dilalui oleh garis Khatulistiwa. Batas wilayah administratif Kabupaten Sintang yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Serawak (Malaysia Bagian Timur) dan Kabupaten Kapuas Hulu, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Melawi, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau.

Kabupaten Sintang dengan ibukota Sintang, terdiri dari 14 kecamatan, 281 desa, dan 6 kelurahan. Keempat belas kecamatan yang berada di Kabupaten Sintang yaitu Kecamatan Serawai, Ambalau, Kayan Hulu, Sepauk, Tempunak, Sungai Tebelian, Sintang, Dedai, Kayan Hilir, Kelam Permai, Binjai Hulu, Ketungau Hilir, Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu.

Kabupaten Sintang merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia khususnya negara bagian Serawak. Wilayah

Kabupaten Sintang yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia adalah Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu.

Kabupaten Sintang merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah ketiga terbesar di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu sekitar 14 persen dari luas Provinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah Kabupaten Sintang yaitu  $21.635 \text{ km}^2$  dengan wilayah terluas terdapat di Kecamatan Ambalau yaitu  $6.386,40 \text{ km}^2$  atau 29,52 persen, sedangkan Kecamatan Sintang merupakan kecamatan yang terkecil luas wilayahnya yaitu  $277,05 \text{ km}^2$  atau 1,28 persen. Dari luas tersebut, sebagian besar wilayah Kabupaten Sintang merupakan wilayah perbukitan dengan luas sekitar  $13.573,75 \text{ km}^2$  atau 62,74 persen. Adapun luas wilayah per kecamatan dapat dilihat tabel dibawah ini. Adapun jarak antar ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, jarak paling jauh berada di kecamatan Ambalau, sedangkan jarak paling dekat berada di kecamatan Sintang. Pada umumnya jalur transportasi yang menghubungkan antar ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan adalah transportasi darat dengan kondisi jalan dan jembatan yang kurang baik. Berikut ini disajikan data tentang gambaran kecamatan di Kabupaten Sintang seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1. Luas Wilayah Kabupaten Sintang

No.	Kecamatan	Ibukota	Jarak Ibukota Kabupaten	Luas (km)	(%)
1	Serawai	Ng.Serawai	171,00 km	2.127,50	9,83
2	Ambalau	Ng. Kemangai	302,25 km	6.386,40	29,52
3	Kayan Hulu	Ng. Tebidah	105,10 km	937,50	4,33
4	Sepauk	Ng. Sepauk	54,50 km	1.825,70	8,44
5	Tempunak	Ng. Tempunak	14,50 km	1.027,00	4,75
6	Dedai	Ng. Dedai	25,00 km	694,10	3,21
7	Kayan Hilir	Ng. Mau	73,20 km	1.136,70	5,25
8	Sintang	Sintang	13,00 km	277,05	1,28
9	Sungai Tebelian	Sungai Ukoi	18,00 km	526,50	2,43
10	Kelam Permai	Kebong	20,00 km	523,80	2,42
11	Binjai Hulu	Binjai	20,00 km	307,65	1,42
12	Ketungau Hilir	Ng. Ketungau	71,00 km	1.544,50	7,14
13	Ketungau Tengah	Ng. Merakai	91,00 km	2.132,40	10,09
14	Ketungau Hulu	Senaning	165,00 km	2.138,20	9,88

Sumber : (Kabupaten Sintang Dalam Angka 2008, Bappeda – BPS)

Mengenai jumlah penduduk Kabupaten Sintang pada tahun 2007 yaitu 352.544 jiwa, dengan penduduk laki-laki sebanyak 180.637 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 171.907 jiwa. Rata-rata jumlah penduduk per km<sup>2</sup> sebanyak 16 jiwa. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Sintang tahun 2007 rata-rata 1,81 persen. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan LPP pada tahun sebelumnya yang besarnya rata-rata 1,84 persen per tahun. Penyebaran penduduk Kabupaten Sintang tidak merata antar kecamatan yang satu dengan kecamatan lainnya. Kecamatan Sintang memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu 54.023 jiwa dengan LPP sebesar 3,60 persen pada tahun 2007, sedangkan yang menempati posisi kedua yaitu Kecamatan Sepauk dengan penduduk sebanyak 43.685 jiwa dan LPP sebesar 1,59 persen, dan yang menempati posisi ketiga adalah Kecamatan Sungai Tebelian dengan jumlah penduduk 27.367 jiwa dan LPP sebesar 0,99 persen, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 4.2. Keadaan Penduduk Kabupaten Sintang  
Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Laki-laki ( jiwa )	Perempuan ( jiwa )	Jumlah ( jiwa )
1	Serawai	10.846	10.369	21.215
2	Ambalau	7.268	6.817	14.085
3	Kayan Hulu	10.967	10.729	21.696
4	Sepauk	21.568	19.995	41.563
5	Tempunak	12.540	11.476	24.016
6	D e d a i	12.689	12.090	24.779
7	Kayan Hilir	11.787	11.223	23.010
8	Sintang	26.149	25.249	51.398
9	Sungai Tebelian	13.382	12.655	29.037
10	Kelam Permai	7.179	6.907	14.086
11	Binjai Hulu	5.471	5.179	10.650
12	Ketungau Hilir	9.821	9.262	19.083
13	Ketungau Tengah	13.180	12.392	51.572
14	Ketungau Hulu	9326	8.902	18.226

Sumber : (Kabupaten Sintang Dalam Angka 2008, Bappeda – BPS)

Dalam perkembangan kependudukan di Kabupaten Sintang mengalami persoalan yang sama dengan daerah lain di wilayah Kalimantan Barat, yaitu persoalan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, penyebaran dan kepadatan penduduk yang tidak merata, dimana terdapat beberapa kecamatan cukup padat, sementara di kecamatan lainnya kepadatannya cukup rendah, kemudian persoalan lain yang erat kaitannya dengan perkembangan kependudukan adalah daya dukung prasarana transportasi yang kurang seimbang dengan perkembangan kependudukan, terutama pada daerah-daerah pedalaman yang masih sulit dijangkau bahkan sampai tahun 2007 masih ada beberapa ibukota kecamatan yang belum dapat dijangkat dengan kendaraan roda empat.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang mencapai 4,69 persen pada tahun 2008, pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 5,16 persen.

Pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 6,19 persen, kemudian sektor bangunan sebesar 5,62 persen, disusul sektor jasa-jasa sebesar 5,55 persen, sedangkan sektor-sektor lainnya juga mengalami pertumbuhan positif. Berikut ini ditampilkan data tentang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang menurut sektor tahun 2004-2008.

Tabel 4.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang Menurut Sektor Tahun 2004 – 2008 (Persen)

No.	Sektor	Pertumbuhan Ekonomi				
		2004	2005	2006	2007	2008*)
1.	Pertanian	-0,66	2,65	3,68	3,71	4,32
2.	Pertambangan dan Penggalian	2,65	3,59	3,11	3,95	3,03
3.	Industri Pengolahan	8,82	8,62	6,25	6,51	4,20
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	2,00	2,66	2,52	1,31	3,74
5.	Bangunan	4,00	6,42	7,07	7,30	5,62
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	4,62	5,81	5,53	6,18	4,77
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	4,69	4,32	4,97	6,08	6,91
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	4,88	3,80	4,78	5,12	5,21
9.	Jasa – jasa	6,85	5,74	7,49	6,04	5,55
<b>PDRB</b>		<b>2,86</b>	<b>4,61</b>	<b>5,01</b>	<b>5,16</b>	<b>4,69</b>

Sumber : BPS Kabupaten Sintang tahun 2008.

Pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 6,91 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 6,08 persen, meningkatnya pertumbuhan sektor ini terutama didukung oleh tingginya pertumbuhan sub sektor telekomunikasi sebesar 11,84 persen, hal ini disebabkan karena terus berkembang pesatnya teknologi telepon seluler, khususnya terhadap kenyamanan kepada pengguna dan tarif harga provider yang semakin murah, telah ikut mendorong perkembangan dalam sub sektor ini.

Pertumbuhan sektor listrik, gas dan air bersih juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2007 yaitu dari 1,31 persen menjadi 3,74 persen, cukup tingginya pertumbuhan sektor ini terutama disebabkan oleh tingginya pertumbuhan sub sektor listrik sebesar 5,96 persen. Sektor pertanian juga mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 3,71 persen menjadi 4,32 persen, peningkatan ini terutama disebabkan oleh cukup tingginya peningkatan pertumbuhan sub sektor tanaman bahan makanan yaitu dari 1,82 persen menjadi 5,85 persen. Pertumbuhan sektor industri pengolahan tahun 2008 sebesar 4,20 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 6,51 persen. Hal ini disebabkan karena meningkatnya harga bahan baku industri pengolahan, sehingga produksinya menurun dibandingkan tahun 2008. Pertumbuhan sektor bangunan pada tahun 2008 juga lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 7,30 persen menjadi 5,62 persen, hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian yaitu dari 3,97 persen menjadi 3,03 persen.

Angkatan kerja merupakan faktor penting dalam proses produksi, yaitu sebagai sarana produksi. Penduduk usia kerja dikelompokkan ke dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Di Indonesia, yang dianggap sebagai angkatan kerja adalah penduduk yang telah mencapai usia 10 tahun ke atas. Pada tahun 2007, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk maka jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Sintang mencapai 275.340 jiwa atau bertambah sebanyak 4.384 jiwa atau 1,64 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 4.4. Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Golongan Umur Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Sintang

No.	Golongan Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	10 – 14	22.014	21.435	43.449
2.	15 – 19	20.106	21.108	41.214
3.	20 – 24	17.042	19.314	36.356
4.	25 – 29	16.548	17.002	33.550
5.	30 – 34	14.409	13.020	27.429
6.	35 – 39	12.301	11.791	24.092
7.	40 – 44	10.701	9.417	20.118
8.	45 – 49	8.289	7.135	15.424
9.	50 – 54	6.365	5.374	11.739
10.	55 – 59	4.526	3.532	8.058
11.	60 – 64	3.489	2.618	6.107
12.	65 – 69	2.064	1.445	3.509
13.	70 – 74	1.377	901	2.278
14.	75 +	1.107	910	2.017
	2007	14.0338	136.002	275.340

Sumber : BPS Kabupaten Sintang tahun 2008.

## 2. Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2006-2010

Salah faktor penting dalam melihat kondisi suatu daerah adalah mengenai kebijakan pembangunan daerah tersebut. Di Kabupaten Sintang kebijakan pembangunan daerah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Periode 2006-2010 seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Keberadaan RPJM Kabupaten Sintang tahun 2006-2010 merupakan aktualisasi dari visi, misi dan prioritas program Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih dalam pelaksanaan Pilkada langsung di Kabupaten Sintang Tahun 2005, dimana yang

terpilih adalah pasangan Milton Crosby dan Jarot Winarno yang dilantik pada tanggal 12 Agustus 2005.

Adapun muatan substansi RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2006-2010 dapat dijelaskan sebagai berikut. Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006-2010, yaitu: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Produktif, Berkualitas, Sejahtera, dan Demokratis. Visi di atas mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Produktif, adalah masyarakat yang kegiatan ekonominya berkembang dengan baik, kreatif dan inovatif yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan investasi, membaiknya infrastruktur dasar, dan pengelolaan SDA yang optimal dengan tetap berwawasan lingkungan.
- b. Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Berkualitas, adalah masyarakat yang derajat kesehatan dan tingkat pendidikannya semakin membaik, berakhlak mulia dan memiliki ketahanan budaya.
- c. Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Sejahtera, adalah masyarakat yang kebutuhan primer dan kebutuhan sekundernya terpenuhi, serta hidup dalam lingkungan masyarakat yang aman dan damai.
- d. Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Demokratis, adalah masyarakat yang kehidupannya berasaskan tertib hukum dan sadar politik serta menegakkan supremasi hukum dan HAM, dengan memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat dalam suasana yang demokratis dan selaras dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Untuk mencapai Visi tersebut, kemudian dirumuskan misi pembangunan daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006-2010, yaitu:

- a. Memberdayakan potensi usaha ekonomi kerakyatan yang mengarah pada kemampuan produksi dan pemasaran.
- b. Meningkatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan usaha produktif
- c. Melaksanakan pembangunan daerah yang serasi dan seimbang dengan memacu pertumbuhan ekonomi dan didukung dengan percepatan pembangunan infrastruktur.
- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi secara terpadu dan menyeluruh.
- e. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup, serta pembinaan generasi muda, seni budaya dan kegiatan keagamaan.
- f. Meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat dalam suasana demokratisasi, desentralisasi, dan otonomi daerah.
- g. Menerapkan asas, prinsip, standar dan pola penyelenggaraan pelayanan publik.
- h. Menegakkan supremasi hukum dan HAM.

Agar visi dan misi tersebut dapat dicapai secara optimal, maka diperlukan adanya strategi pembangunan daerah yang tepat. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh, ditetapkan 4 (empat) Strategi Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang yaitu:

- a. Strategi Pemenuhan Kebutuhan Dasar (*Human Basic Needs Strategy*) adalah suatu strategi pembangunan yang terfokus pada upaya memenuhi kebutuhan dasar suatu masyarakat di suatu wilayah sehingga dapat hidup secara layak dan sejahtera. Strategi ini diarahkan untuk peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Sintang.

- b. Strategi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar (*Basic Infrastructure Development Strategy*), adalah suatu strategi pembangunan yang terfokus pada upaya penyediaan dan peningkatan infrastruktur dasar yang dibutuhkan suatu masyarakat di suatu wilayah sehingga dapat melaksanakan aktivitasnya secara mudah, lancar dan aman. Strategi ini diarahkan tidak hanya untuk membuka isolasi kawasan namun juga untuk mendukung pengembangan kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh di Kabupaten Sintang.
- c. Strategi Perluasan Investasi (*Investment Development Strategy*), adalah suatu strategi pembangunan yang terfokus pada upaya pengembangan investasi daerah pada sektor/bidang tertentu guna memacu pertumbuhan dan kemajuan daerah tersebut. Strategi ini diarahkan untuk memacu perekonomian daerah melalui perluasan kegiatan investasi di sektor perkebunan dan pertambangan di Kabupaten Sintang.
- d. Strategi Penciptaan Kesempatan Kerja (*Creating Productive Employment Strategy*), adalah suatu strategi pembangunan yang terfokus pada upaya penciptaan, perluasan dan pembinaan kesempatan kerja suatu masyarakat. Strategi ini diarahkan untuk menciptakan kesempatan kerja yang produktif di Kabupaten Sintang.

Stelah strategi pembangunan ditetapkan, maka agar focus pembangunan dapat dilakukan secara menyeluruh, diperlukan penetapan agenda pembangunan daerah. Dengan mengacu pada substansi visi dan misi pembangunan yang ada, ditetapkan 4 (empat) Agenda Pokok Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2006-2010, yaitu:

- a. Agenda mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang Produktif, dengan sub- agenda pembangunan meliputi Peningkatan Investasi dan Pengembangan Industri, Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Revitalisasi Pertanian dan Perbaikan Pengelolaan SDA dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

- b. Agenda mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang Berkualitas, dengan sub- agenda pembangunan meliputi Peningkatan Kesehatan Masyarakat, Peningkatan Kualitas Pendidikan, Peningkatan Keluarga Berkualitas, Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak, Peningkatan Kualitas Pemuda Dan Olah Raga, Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Pengembangan Budaya.
- c. Agenda mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang Sejahtera, dengan sub- agenda pembangunan meliputi Penanggulangan Kemiskinan, Pengurangan Ketimpangan Pembangunan, Pembangunan Kawasan Perbatasan, Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Harmonisasi Antar Kelompok.
- d. Agenda mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang Demokratis, dengan sub- agenda pembangunan meliputi Peningkatan Ketertiban dan Penegakan Hukum, Peningkatan Tata Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Berwibawa dan Profesional, Revitalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Demokrasi

Bidang industri merupakan salah satu urusan pemerintahan yang menjadi komitmen pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan pembangunan sehingga memerlukan kebijakan pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi obyektif dan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, dalam RPJM Kabupaten Sintang tahun 2006-2010 telah ditetapkan suatu program bernama dicanangkan Program Pengembangan Industri Pengolahan Dan Industri Terkait Lainnya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi industri pengolahan dalam memperkuat struktur industri daerah. Program ini diorientasikan pada pengembangan industri pengolahan berbasis agribisnis dan pengembangan industri kerajinan, industri kecil dan menengah. Arah kegiatan dari Program ini yaitu pengembangan industri pengolahan berbasis hasil pertanian (agro-industry), pengembangan industri pengolahan aneka makanan dan

minuman, termasuk juga pengolahan hasil buah-buahan lokal/musiman dan pembinaan dan pengembangan industri tenun dan anyaman, pembinaan usaha industri kecil dan menengah dalam klaster-klaster (sentra-sentra), disertai pembinaan tertib usaha dan perizinan dan peningkatan ketrampilan teknis dan manajemen usaha industri kecil dan menengah.

### 3. Kondisi dan Perkembangan Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Sintang

Industri kecil dan menengah di Kabupaten Sintang telah eksis sejak dulu dan menjadi usaha masyarakat dalam upaya membiaya kehidupan sosial ekonominya. Dilihat dari perkembangan jumlah unit usaha IKM di Kabupaten Sintang, pada tahun 2006 hingga tahun 2008 telah mengalami penambahan jumlah yang cukup signifikan. Berikut ini dipaparkan data tentang perkembangan jumlah IKM baik industri kecil maupun industri menengah di Kabupaten Sintang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.5. Perkembangan Jumlah IKM Di Kabupaten Sintang  
Tahun 2006-2008

No.	Jenis industri	Jumlah			Pertumb (%)
		2006	2007	2008	
1.	Industri kecil	645	1.659	1.735	4,58
2.	Industri menengah	-	-	-	-
	Jumlah	645	1.659	1.735	4,58

Sumber : Disperindag Kabupaten Sintang Tahun 2008.

Berdasarkan data tersebut dapat dipahami bahwa perkembangan jumlah IKM di Kabupaten Sintang terfokus pada industri kecil dengan tingkat pertumbuhan 4,58%. Sedangkan perkembangan industri menengah di Kabupaten Sintang belum tumbuh dan berkembang karena nilai investasinya yang minimal 1 milyar rupiah.

Selain itu, perkembangan jumlah IKM tersebut juga diwarnai dengan perkembangan jenis usaha IKM yang semakin beragam baik dilihat dari jenis industri kimia, agro dan hasil hutan (IKAHH) maupun industri logam, mesin, elektronika dan aneka. Berbagai jenis usaha tersebut, yang paling besar perkembangannya adalah kue basah dan tahu tempe. Berikut ini dipaparkan data tentang perkembangan jumlah IKM baik industri kecil maupun industri menengah di Kabupaten Sintang terlihat pada tabel berikut ini.

UNIVERSITAS TERBUKA

Tabel 4.6. Jenis Usaha IKM Di Kabupaten Sintang  
Tahun 2006-2008

No.	Jenis usaha industri	Jumlah			Pertumb (%)
		2006	2007	2008	
A.	IKAHH				
1.	Tahu Tempe	51	64	76	18,75
	Gula Aren	8	10	10	0
	Kerupuk Ikan	6	7	7	0
	Kerupuk Singkong	45	56	56	0
	Anyaman bambu/rotan	314	555	557	0,36
	Meubel kayu	8	10	25	150
	Ukiran kayu	6	8	8	0
	Meubel rotan	16	20	20	0
	Perahu kayu	-	-	4	100
	Kue basah	51	64	89	39,06
	Garam	8	10	10	0
	Pengolahan makanan	-	23	25	8,70
	Pengolahan kayu	17	20	32	60
B.	ILMEA				
	Pandai besi	76	225	226	0,44
	Genteng semen	3	4	5	25
	Tenun ikat	13	558	560	0,36
	Sandang	18	18	18	0
	Batako	5	7	7	0
	Jumlah	645	1.659	1.735	4,58

Sumber : Disperindag Kabupaten Sintang tahun 2008.

Dilihat dari segi tenaga kerja, usaha IKM di Kabupaten Sintang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2006, jumlah tenaga kerja IKM yaitu 804 orang, dan tahun 2008 meningkat menjadi 2.055 orang yang mengalami peningkatan 11,99persen. Data tentang perkembangan jumlah tenaga kerja pada IKM baik industri kecil maupun industri menengah di Kabupaten Sintang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.7. Jenis Usaha IKM Di Kabupaten Sintang  
Tahun 2006-2008

No.	Jenis	Jumlah Tenaga Kerja			Pertumb (%)
		2006	2007	2008	
	Industri kecil	804	1.835	2.055	11,99
	Industri menengah	-	-	-	-
	Jumlah	804	1.835	2.055	11,99

Sumber : Disperindag Kabupaten Sintang tahun 2008.

Dilihat dari penyebaran usaha IKM di Kabupaten Sintang, jumlah terbanyak berada di Kecamatan Sintang dengan jumlah 383 jenis usaha IKM, kemudian diikuti Kecamatan Kelam Permai pada peringkat kedua dengan jumlah 341 jenis IKM dan urutan ketiga berada di kecamatan Ketungau Hilir dengan 144 jenis IKM. Untuk lebih jelasnya penyebaran usaha IKM di kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel-atabel berikut ini.

Tabel 4.8. Jenis Usaha IKM Di Kabupaten Sintang  
Tahun 2006-2008

No.	Kecamatan	Jenis IKM		Jumlah Total	%
		Industri Kecil	Industri Menengah		
1.	Sintang	383	-	383	22,07
2.	Sepauk	74	-	74	4,27
3.	Kelam Permai	341	-	341	19,65
4.	Serawai	64	-	64	3,69
5.	Sungai Tebelian	28	-	28	1,61
6.	Binjai Hulu	66	-	66	3,80
7.	Tempunak	106	-	106	6,11
8.	Dedai	166	-	166	9,57
9.	Kayan Hilir	83	-	83	4,78
10.	Kayan Hulu	77	-	77	4,44
11.	Ketungau Tengah	100	-	100	5,76
12.	Ketungau Hulu	71	-	71	4,09
13.	Ketungau Hilir	144	-	144	8,30
14.	Ambalau	32	-	32	1,84
	Jumlah	1.735	-	1.735	100

Sumber : Disperindag Kabupaten Sintang tahun 2008.

Adapun perkembangan jenis usaha IKM di Kabupaten Sintang dilihat dari perkembangan tahun 2006-2008 menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat. Berbagai jenis IKM tumbuh dengan tingkat keragaman yang cukup tinggi di tengah masyarakat Kabupaten Sintang. Berikut ini disajikan data tentang Jenis Usaha IKM Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Sintang Tahun 2006-2008 seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.9. Jenis Usaha IKM Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Sintang Tahun 2006-2008

No.	Kecamatan	Jenis IKM	Jumlah IKM		
1.	Sintang	Pengolahan makanan	25		
		Sandang	15		
		Pengolahan Kayu	32		
		Genteng semen	1		
		Kue basah	23		
		Tahu tempe	24		
		Kerupuk ikan	2		
		Kerupuk singkong	7		
		Gula aren	10		
		Tenun ikat	67		
		Anyaman bambu/rotan	85		
		Meubel kayu	22		
		Ukiran kayu	8		
		Pandai besi	55		
		Batako	7		
		2.	Sepauk	Sandang	3
				Kue basah	5
Tahu tempe	6				
Anyaman bambu/rotan	40				
Kerupuk singkong	10				
Garam	10				
3.	Kelam Permai	Meubel kayu	1		
		Tenun ikat	168		
		Pandai besi	35		
		Kue basah	8		
		Tahu tempe	10		
		Anyaman bambu/rotan	110		
		Kerupuk singkong	9		

4.	Serawai	Kue basah	5
		Anyaman bambu/rotan	30
		Pandai besi	29
5.	Sungai Tebelian	Genteng semen	4
		Kue basah	6
		Tahu tempe	16
6.	Binjai Hulu	Kerupuk singkong	2
		Tenun ikat	42
		Kue basah	3
		Tahu tempe	10
7.	Tempunak	Kerupuk singkong	11
		Pandai besi	29
		Kue basah	3
		Tahu tempe	6
8.	Dedai	Anyaman bambu/rotan	40
		Kerupuk singkong	8
		Meubel rotan	20
		Pandai besi	49
		Tenun ikat	107
9.	Kayan Hilir	Kue basah	6
		Kerupuk singkong	4
		Tenun ikat	74
		Kue basah	4
10.	Kayan Hulu	Meubel kayu	2
		Tenun ikat	47
		Kue basah	5
11.	Ketungau Tengah	Anyaman bambu/rotan	25
		Perahu kayu	4
		Tenun ikat	52
		Kue basah	7
		Tahu tempe	4
12.	Ketungau Hulu	Anyaman bambu/rotan	30
		Kerupuk singkong	3
		Kue basah	6
13.	Ketungau Hilir	Anyaman bambu/rotan	65
		Kue basah	5
		Anyaman bambu/rotan	132
		Kerupuk ikan	5
14.	Ambalau	Kerupuk singkong	2
		Kue basah	3
		Pandai besi	29
<b>Jumlah</b>			<b>1.735</b>

Sumber : Disperindag Kabupaten Sintang tahun 2008.

#### 4. Prospek Penerapan OVOP Dalam Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Sintang

Untuk dapat mengetahui bagaimana prospek penerapan pendekatan OVOP dalam pengembangan usaha kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Sintang, penulis akan mempergunakan parameter yang di dalamnya mencakup beberapa aspek yang dianggap sangat menentukan sehingga penerapan OVOP tersebut benar-benar layak dan memiliki harapan untuk diterapkan di masa mendatang di Kabupaten Sintang. Adapun parameter yang penulis pergunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek, yaitu potensi dukungan ketersediaan sumber daya, potensi kebutuhan pasar, potensi penciptaan lapangan kerja dan potensi terhadap *multipler effect*.

##### a. Potensi Dukungan Ketersediaan sumber daya,

Penerapan pendekatan OVOP dalam pengembangan IKM di Kabupaten Sintang sangat ditentukan adanya dukungan ketersediaan sumber daya. Ada dua jenis sumber daya pendukung penerapan pendekatan OVOP dalam pengembangan IKM, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dukungan sumber daya alam mencakup ketersediaan bahan baku dan lahan atau tempat aktivitas IKM dilakukan. Sedangkan dukungan sumber daya manusia menyangkut ketersediaan tenaga kerja untuk melaksanakan fungsi IKM. Dukungan ketersediaan sumber daya menjadi penting karena selain untuk menyediakan bahan baku perkembangan industri kecil dan menengah, juga penyediaan tenaga kerja sebagai modal dasar dari pengembangan IKM itu sendiri. Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lokasi desa dan kecamatan pada wilayah Kabupaten Sintang dan didukung oleh data sekunder tentang profil wilayah (kabupaten Sintang

dalam Angka), dilihat dari daya dukung ketersediaan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia disajikan data seperti terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.10. Prospek Penerapan OVOP Dalam Pengembangan IKM Berdasarkan Potensi Dukungan Ketersediaan Sumber Daya**

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Potensi IKM	Ketersediaan sumber daya	
				sumber daya alam	SDM
1.	Sintang	15	Industri kerajinan, pengolahan kayu dan industri pengolahan makanan	Lahan dan bahan baku tersedia	Tersedia potensi tenaga kerja sekitar 766 orang
2.	Kelam Permai	16	Industri kerajinan	Bahan baku tersedia	Tersedia potensi tenaga kerja sekitar 282 orang
3.	Binjai	11	Industri pengolahan makanan	Lahan dan bahan baku tersedia dan dapat dikembangkan	Tersedia potensi tenaga kerja sekitar 213 orang
4.	Dedai	20	Industri kerajinan dan logam	Lahan dan bahan baku tersedia	Tersedia potensi tenaga kerja sekitar 496 orang
5.	Sungai Tebelian	21	Industri pengolahan makanan dan industri bahan bangunan	Bahan baku tersedia	Tersedia potensi tenaga kerja sekitar 581 orang
6.	Sepauk	33	Industri kerajinan dan pengolahan makanan	Lahan dan bahan baku tersedia	Tersedia potensi tenaga kerja sekitar 623 orang
7.	Tempunak	24	Industri logam	Bahan baku tersedia	Tersedia potensi tenaga kerja sekitar 480 orang

8.	Kayan Hilir	26	Industri pengolahan kayu	Lahan dan bahan baku tersedia	Tersedia potensi tenaga kerja sekitar 460 orang
9.	Kayan Hulu	29	Industri kerajinan	Lahan dan bahan baku tersedia	Tersedia potensi tenaga kerja sekitar 434 orang
10.	Serawai	24	Industri logam dan industri kerajinan	Lahan dan bahan baku tersedia	Tersedia potensi tenaga kerja sekitar 424 orang
11.	Ambalau	13	Industri logam	Bahan baku tersedia	Tersedia potensi tenaga kerja sekitar 282 orang
12.	Ketungau Hilir	17	Industri perikanan	Bahan baku tersedia dan dapat dikembangkan	Tersedia potensi tenaga kerja sekitar 382 orang
13.	Ketungau Tengah	20	Industri pengolahan kayu	Lahan dan bahan baku tersedia	Tersedia potensi tenaga kerja sekitar 511 orang
14	Ketungau Hulu	18	Industri kerajinan	Lahan dan bahan baku tersedia	Tersedia potensi tenaga kerja sekitar 365 orang

Sumber : Data Sekunder Dan Hasil Observasi, 2009

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Binjai Hulu yaitu Bapak Indra Caya S Sos memberikan pendapat mengenai potensi dukungan sumber daya dalam penerapan OVOP untuk pengembangan IKM di Kabupaten Sintang sebagai berikut :

”jika melihat ketersediaan bahan baku, lahan dan jumlah tenaga kerja di kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang, terutama kecamatan Binjai Hulu, saya yakin pengembangan usaha industri kecil dan rumah tangga yang ada sangat menjanjikan. Bahan baku industri di setiap kecamatan cukup melimpah, begitu pula dengan lahan yang masih sangat luas dan belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Jumlah tenaga kerja, juga masih banyak karena pemuda-pemudi yang menganggur juga semakin bertambah”.

b. Potensi kebutuhan pasar

Untuk dapat menerapkan pendekatan OVOP dalam pengembangan IKM di Kabupaten Sintang, keberadaan potensi kebutuhan pasar sangat penting. Dalam perspektif ekonomi, produk IKM akan eksis apabila memiliki tempat untuk dipasarkan sehingga memberikan nilai tambah ekonomi yang cukup signifikan. Faktor potensi kebutuhan pasar berkaitan dengan adakah potensi pembeli produk IKM, dimana mereka, apakah segmen pasar itu pada lingkup domestik ataupun mengarah kepada ekspor. Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lokasi desa dan kecamatan pada wilayah Kabupaten Sintang dan didukung oleh data sekunder tentang profil wilayah (Kabupaten Sintang dalam Angka), dilihat dari daya dukung ketersediaan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.11. Prospek Penerapan OVOP Dalam Pengembangan IKM  
Berdasarkan Potensi Kebutuhan Pasar

No.	Kecamatan	Potensi IKM	Potensi dan Segmen Pasar	
			Potensi	Segemen
1.	Sintang	Industri kerajinan, pengolahan kayu dan industri pengolahan makanan	Besar	Domestik
2.	Kelam Permai	Industri kerajinan	Besar	Domestik dan ekspor
3.	Binjai	Industri pengolahan makanan	Besar	Domestik
4.	Dedai	Industri kerajinan dan logam	Besar	Domestik dan ekspor
5.	Sungai Tebelian	Industri pengolahan makanan dan industri bahan bangunan	Besar	Domestik
6.	Sepauk	Industri kerajinan dan pengolahan makanan	Besar	Domestik
7.	Tempunak	Industri logam	Sedang	Domestik
8.	Kayan Hilir	Industri pengolahan kayu	Besar	Domestik
9.	Kayan Hulu	Industri kerajinan	Besar	Domestik
10.	Serawai	Industri logam dan industri kerajinan	Besar	Domestik
11.	Ambalau	Industri logam	Sedang	Domestik
12.	Ketungau Hilir	Industri perikanan	Besar	Domestik
13.	Ketungau Tengah	Industri pengolahan kayu	Besar	Domestik
14.	Ketungau Hulu	Industri kerajinan	Besar	Domestik

Sumber : Data Sekunder Dan Hasil Observasi, 2009

Menurut hasil wawancara dengan Kabid Perekonomian Bappeda Kabupaten Sintang yang memberikan pendapat mengenai potensi kebutuhan pasar dalam penerapan OVOP untuk pengembangan IKM di Kabupaten Sintang sebagai berikut :

”Secara obyektif, keberadaan pasar untuk pengembangan IKM sangat penting, bahkan dapat dikatakan paling penting. Tidak akan adanya manfaatnya, jika suatu produk yang telah dihasilkan industri tetapi kemudian tidak dapat dipasarkan karena tidak ada pembelinya. Di Kabupaten Sintang, produk industri seperti tenun ikat, anyaman bambu, pandai besi dan pengolahan kayu seperti meubelir atau ukuran sangat prosepek dilihat dari potensi pasar yang ada, baik domestik ataupun ekspor. Saya dapat berikan contoh, pada produk tenun ikat di kecamatan Kelam Permai sangat diminati para turin luar daerah dan mancanegara. Hanya saja, selama ini karena sentusan promosi yang minim maka produk tersebut kurang dilirik oleh para pembeli.

#### c. Potensi penciptaan lapangan kerja

Selain daya dukung sumber daya dan kebutuhan pasar, prospek penerapan OVOP juga ditentukan oleh potensi penciptaan lapangan kerja. Dalam kaitan ini, penting untuk diketahui apakah pendekatan OVOP dalam IKM yang akan dikembangkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Artinya, melalui OVOP dalam IKM apakah mampu menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja sehingga memberi kontribusi optimal terhadap pengurangan pengangguran di daerah tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lokasi desa dan kecamatan pada wilayah Kabupaten Sintang dan didukung oleh data sekunder tentang profil wilayah (kabupaten Sintang dalam Angka), dilihat dari potensi penyediaan lapangan kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.12. Prospek Penerapan OVOP Dalam Pengembangan IKM Berdasarkan Potensi Penciptaan lapangan Kerja

No.	Kecamatan	Potensi IKM	Potensi Penciptaan Lapangan Kerja
1.	Sintang	Industri kerajinan, pengolahan kayu dan industri pengolahan makanan	Tinggi
2.	Kelam Permai	Industri kerajinan	Tinggi
3.	Binjai	Industri pengolahan makanan	Tinggi
4.	Dedai	Industri kerajinan dan logam	Tinggi
5.	Sungai Tebelian	Industri pengolahan makanan dan industri bahan bangunan	
6.	Sepauk	Industri kerajinan dan pengolahan makanan	Tinggi
7.	Tempunak	Industri logam	Sedang
8.	Kayan Hilir	Industri pengolahan kayu	Tinggi
9.	Kayan Hulu	Industri kerajinan	Tinggi
10.	Serawai	Industri logam dan kerajinan	Tinggi
11.	Ambalau	Industri logam	Sedang
12.	Ketungau Hilir	Industri perikanan	Tinggi
13.	Ketungau tengah	Industri pengolahan kayu	Tinggi
14.	Ketungau Hulu	Industri kerajinan	Tinggi

Sumber : Data Sekunder Dan Hasil Observasi, 2009

Hasil hasil wawancara dengan Pelaku IKM di Kota Sintang yaitu Bapak Suratman yang bergerak di industri pengolah kayu yang memberikan pendapat mengenai potensi penciptaan lapangan kerja dalam penerapan OVOP untuk pengembangan IKM di Kabupaten Sintang sebagai berikut :

"Pengalaman saya selama ini, industri kecil dalam segala hal baik pengolahan kayu maupun lainnya, tidak ada kekhawatiran tentang tenaga kerja. Karena memang mereka jumlahnya sangat banyak dan sampai saat ini kurang terserap dalam kegiatan industri. Bahkan saya dan beberapa teman saat ini tidak dapat menampung mereka dengan alasan keterbatasan produksi dan skala usaha kami yang masih kecil".

d. Potensi terhadap *multiplier effect*

Aspek lain yang juga sangat menentukan prospek penerapan OVOP dalam pengembangan IKM di Kabupaten Sintang adalah potensi terhadap *multipleir effect* atau dampak ganda yang berhubungan dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar. potensi terhadap *multipleir effect* ini berkaitan sejauh mana suatu produksi IKM di sentra tertentu selain dapat merangsang masyarakat untuk menciptakan bidang usaha lainnya, juga mampu menumbuhkembangkan usaha sosial ekonomi masyarakat sekitar sehingga dinamika perekonomian menjadi semakin bergerak mencapai nilai tambah yang lebih besar. Umumnya dampak ganda produk IKM di sentra tertentu dapat dipilah menjadi dampak langsung, dampak tak langsung maupun dampak ikutan.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lokasi desa dan kecamatan pada wilayah Kabupaten Sintang dan didukung oleh data sekunder tentang profil wilayah (kabupaten Sintang dalam Angka), dilihat dari daya dukung ketersediaan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.13. Prospek Penerapan OVOP Dalam Pengembangan IKM Berdasarkan Potensi *Multiplier Effect*

No.	Kecamatan	Potensi IKM	Potensi <i>multiplier effect</i>
1.	Sintang	Industri kerajinan, pengolahan kayu dan industri pengolahan makanan	Sedang
2.	Kelam Permai	Industri kerajinan	Sedang
3.	Binjai	Industri pengolahan makanan	Sedang
4.	Dedai	Industri kerajinan dan logam	Sedang
5.	Sungai tebelian	Industri pengolahan makanan dan industri bahan bangunan	Sedang
6.	Sepauk	Industri kerajinan dan pengolahan makanan	Sedang
7.	Tempunak	Industri logam	Sedang
8.	Kayan Hilir	Industri pengolahan kayu	Sedang
9.	Kayan Hulu	Industri kerajinan	Sedang
10.	Serawai	Industri logam dan kerajinan	Sedang
11.	Ambalau	Industri logam dan kerajinan	Sedang
12.	Ketungau Hilir	Industri perikanan	Sedang
13.	Ketungau tengah	Industri pengolahan kayu	Sedang
14.	Ketungau Hulu	Industri kerajinan	Sedang

Sumber : Data Sekunder Dan Hasil Observasi, 2009

Menurut bapak Tony selaku tokoh masyarakat di kecamatan Kelam Permai bahwa penerapan OVOP terhadap pengembangan IKM sangat membawa dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dengan adanya produk unggulan di setiap kecamatan, maka kehidupan ekonomi lainnya menjadi tumbuh dan berkembang. Sub sektor lainnya juga terimbas ikut berkembang. Akan tercipta motivasi untuk bekerja, peluang untuk berusaha terbuka lebar dan potensi masuknya investor juga akan semakin bertambah besar. Pak Tony yang juga menjadi anggota DPRD Kabupaten Sintang memberikan contoh di kecamatan Kelam Permai yang lebih potensial dikembangkan industri tenun ikat. Produk tenun ikat akan melahirkan dampak langsung yaitu penghasilan masyarakat akan semakin meningkat dan serapan tenaga kerja juga akan bertambah banyak. Sedangkan dampak tak langsung dari produk tenun ikat ini akan memicu berkembangnya kegiatan pariwisata yang memiliki keterkaitan lintas sektor dan lintas skala

usaha. Tenun ikat sebagai suatu produk lokal yang khas akan diminati para wisatawan nasional dan terutama wisatawan manca negara. Daya tarik produk tenun ikat di Kecamatan Kelam Permai ini pada gilirannya akan melahirkan kegiatan pariwisata yang secara berlapis-lapis memicu mata rantai usaha yang terkait di dalamnya sehingga akan menciptakan efek ekonomi multi ganda (*multiplier effect*) yang akan memberikan nilai manfaat ekonomi yang sangat berarti bagi semua pihak. Adapun dampak ikutan dari produk tenun ikat di Kecamatan Kelam Permai akan terlihat pada antusiasme masyarakat setempat untuk mengembangkan budidaya tumbuhan pendukung seperti tanaman tertentu yang dibutuhkan untuk pewarna tenun ikat yang tentunya akan berdampak ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat.

Mengingat bahwa konsep OVOP adalah suatu pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal, maka pilihan terhadap locus/tempat wilayah sebagai sentra menjadi penting. Terkait dengan locus penerapan pendekatan OVOP dalam pengembangan IKM di Kabupaten Sintang, dengan pilihan pada tiga locus yaitu desa, kecamatan dan kabupaten, berdasarkan hasil wawancara dengan para nara sumber umumnya mereka berpendapat bahwa untuk langkah awal sebaiknya penerapan pendekatan OVOP dalam pengembangan IKM di Kabupaten Sintang berada di kecamatan. Data tentang hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.14. Penilaian Responden terhadap Locus/tempat penerapan OVOP dalam pengembangan IKM Di Kabupaten Sintang

No.	Nara sumber	Locus/tempat penerapan OVOP			Argumentasi
		Desa	Kecamatan	Kabupaten	
1.	Perwakilan Desa/Kecamatan	✓	✓		
2.	Bappeda		✓		
3.	Disperindag		✓		
4.	UNKA		✓		
5.	DPRD	✓			
6.	Pelaku IKM		✓		
7.	Tokoh masyarakat		✓		

Sumber : data primer, 2009

Secara khusus Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Sintang memberikan pendapat mengenai locus/tempat penerapan OVOP dalam pengembangan IKM di Kabupaten Sintang sebagai berikut :

"Jika melihat potensi dan kecenderungan jenis usaha yang sudah eksis, lebih tepat penerapan pendekatan OVOP untuk pengembangan IKM di Kabupaten Sintang berada di level kecamatan. Pilihan kecamatan ini sebagai langkah awal, kemudian dimasa mendatang akan lebih ideal akan diarahkan akan berada di desa. Pilihan terhadap kecamatan sebagai locus OVOP ini dikarenakan dalam implementasinya ada kendala geografis, kapasitas SDM minim, dan belum adanya landaan yuridis penetapan produk unggulan".

Adapun indentifikasi jenis-jenis industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Sintang yang akan menjadi produk unggulan untuk masing-masing kecamatan, berdasarkan hasil observasi, wawancara dan *Focus Group Discussion* yang telah dilakukan dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.15. Identifikasi Jenis Produk Unggulan Guna menerapkan OVOP dalam pengembangan IKM di Kabupaten Sintang

No.	Kecamatan	Potensi IKM	Pilihan produk unggulan	Analisis Potensi			
				Sumber Daya	Pasar	Tenaga Kerja	Multiplier Effct
1.	Sintang	Industri kerajinan, pengolahan kayu dan industri pengolahan makanan	industri pengolahan makanan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang
2.	Kelam Permai	Industri kerajinan	Industri kerajinan (tenun ikat)	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
3.	Binjai	Industri pengolahan makanan	Industri pengolahan makanan (tahu dan tempe)	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang
4.	Dedai	Industri kerajinan dan logam	Industri kerajinan (tenun ikat)	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
5.	Sungai Tebelian	Industri pengolahan makanan dan industri bahan bangunan	Industri bahan bangunan (genteng dan batako)	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang
6.	Sepauk	Industri kerajinan dan pengolahan makanan	Industri kerajinan (anyaman rotan/bambu)	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang
7.	Tempunak	Industri logam	Industri logam (pandai besi)	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
8.	Kayan Hilir	Industri pengolahan kayu	Industri pengolahan kayu (meubel kayu)	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang
9.	Kayan Hulu	Industri kerajinan	Industri kerajinan (anyaman rotan/bambu)	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang

10.	Serawai	Industri logam	Industri kerajinan (anyaman rotan/bambu)	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang
11.	Ambalau	Industri logam	Industri logam (pandai besi)	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
12.	Ketungau Hilir	Industri perikanan	Industri perikanan (olahan berbahan baku ikan)	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang
13.	Ketungau tengah	Industri pengolahan kayu	Industri pengolahan kayu (meubel kayu)	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang
14	Ketungau Hulu	Industri kerajinan	Industri kerajinan (meubel rotan dan anyaman rotan/bambu)	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang

Sumber : Data Primer, 2009

Dasar pilihan terhadap jenis produk unggulan untuk setiap kecamatan tersebut, menurut hasil FGD baik dengan pihak kecamatan, Bappeda, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan serta dari UNKA Sintang diperoleh pemahaman bahwa beberapa kriteria yang dipergunakan dalam identifikasi produk unggulan tersebut yaitu, ketersediaan bahan baku di daerah, tingkat dan jenis ketrampilan yang diperlukan sudah ada di daerah, tersedia dan terbukanya pasar, komoditas/produk mempunyai prospek dipasarkan, membutuhkan banyak tenaga-kerja, menunjang daerah terbelakang yang akan dikembangkan.

## B. Faktor pendukung dan Faktor Penghambat Yang Berpotensi Penerapan OVOP Dalam Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah di Kabupaten Sintang

Untuk dapat menerapkan pendekatan OVOP dalam pengembangan IKM di Kabupaten Sintang, perlu diidentifikasi berbagai faktor pendukung dan penghambat yang berpotensi menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara dan FGD yang telah dilakukan diperoleh data seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.16. Jenis Usaha IKM Di Kabupaten Sintang Tahun 2006-2008

No.	Nara Sumber	Pendapat		Dasar Argumentasi
		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	
1	Perwakilan Desa/Kecamatan	Adanya jenis produk industri yang dihasilkan	Tidak adanya perda yang mengatur secara spesifik dan dukungan jalan dan listrik yang masih terbatas	Produk yang dihasilkan tanpa diatur dan dilindungi aturan yang baik tidak akan berkembang
2.	Bappeda	Selain potensi lokal yang melimpah, juga adanya jenis produk yang dihasilkan	akses modal yang terbatas dan penguasaan teknologi yang rendah	Tanpa dukungan modal dan teknologi potensi dan produk industri akan terhambat dalam pengembangannya.
3.	Disperindag	Potensi sumber daya lokal yang baik, adanya jenis produk yang dihasilkan dan adanya lembaga sosial	Aturan yang belum kondusif di tingkat daerah, lemahnya modal dan pasar yang masih "kabur"	Sebagai suatu sistem produksi, diperlukan ketrampilan berbagi faktor seperti potensi dan produk, modal, teknologi, sistem kebijakan dan dukungan infrastruktur.
4.	UNKA	Ketersediaan produk, potensi pasar dan tenaga kerja yang melimpah	Sistem kebijakan, dalam arti peraturan daerah yang belum ada dan dukungan infrastruktur dasar yang rendah	Perkembangan industri ditentukan oleh faktor internal dan eksternal, yaitu modal, teknologi, pasar, infrastruktur dan kelembagaan

5.	DPRD	Adanya jenis prioduk industri yang dihasilkan	rendahnya daya dukung infrastruktur dasar dan rendahnya komitmen pemerintah	Produk yang dihasilkan tanpa diatur dan dilindungi aturan yang baik tidak akan berkembang
6.	Pelaku IKM	Adanya jenis prioduk industri yang dihasilkan	Akses modal yang terbatas dan tidak adanya perda yang mengatur secara spesifik	Produk yang dihasilkan tanpa diatur dan dilindungi aturan yang baik tidak akan berkembang
7.	Tokoh masyarakat	Adanya jenis prioduk industri yang dihasilkan dan tersedianya pasar serta tenaga kerja	Kurang dukungan modal dan teknologi yang memadai	Modal menjadi faktor penting pengembangan IKM di tengah masyarakat

Sumber ; Data Primer, 2009

Pernyataan tentang faktor pendukung jika diterapnya pendekatan OVOP dalam pengembangan IKM di Kabupaten Sintang dikemukakan oleh bapak Antonius S Hut MP dari Universitas kapuas Sintang sebagai berikut :

”Pendekatan OVOP untuk pengembangan IKM di Kabupaten Sintang ditunjang oleh beberapa faktor pendukung, yaitu secara aktual masyarakat telah melakukan industri kecil yang menghasilkan produk tertentu, adanya potensi pasar baik domestik maupun ekspor seperti tenun ikat dan ketersediaan tenaga kerja yang ckup melimpah”.

Adapun hasil wawancara dengan pelaku IKM di Kabupaten Sintang, yaitu Bapak Ajun tentang faktor-faktor penghambat jika diterapnya pendekatan OVOP dalam pengembangan IKM di Kabupaten Sintang sebagai berikut :

”Beberapa faktor yang berpotensi untuk menghambat penerapan OVOP dalam pengembangan IKM adalah akses modal yang terbatas. Selama ini kami hanya mengandalkan modal seadanya untuk melakukan pengelolaan Industri kecil. Selain itu, saya menilai sampai saat ini belum adanya aturan dari pemda yang mmeberikan jaminan, dukungan serta perlindungan sehingga Industri yang kami rintis dan lakukan selama ini dapat berkembang menjadi lebih baik”

### C. Model kebijakan Penerapan OVOP Dalam Pegembangan Usaha Kecil Dan Menegah di Kabupaten Sintang

Untuk dapat menerapkan pendekatan OVOP dalam pengembangan IKM di Kabupaten Sintang, perlu diidentifikasi model kebijakan yang dianggap paling tepat untuk dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dan FGD yang telah dilakukan diperoleh data seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.17. Jenis Usaha IKM Di Kabupaten Sintang Tahun 2006-2008

No.	Nara sumber	Model kebijakan			Argumentasi
		Non intervensi	Intervensi	Kemitraan	
1.	Perwakilan Desa/Kecamatan			✓	
2.	Bappeda			✓	
3.	Disperindag			✓	
4.	UNKA			✓	
5.	DPRD			✓	
6.	Pelaku IKM		✓		
7.	Tokoh masyarakat		✓		

Sumber : Data Primer, 2009

Pilihan terhadap model kebijakan yang bersifat kemitraan ini, Mantan Kepala Bappeda Kabupaten Sintang yaitu bapak Jannha Lingga memberikan penjelasan sebagai berikut :

”Dengan model kemitraan, akan terwujud pembagian tanggungjawab antara masyarakat selaku pelaku langsung IKM dan pemerintah. Modal kemitraan juga akan mendorong masing-masing pihak untuk saling berperan sesuai dengan domainnya masing-masing. Selain itu, dalam model kemitraan ini, pemerintah akan mendorong masyarakat untuk mandiri semetara pemerintah hanya terbatas sebagai motivator dan fasilitator saja”.

Sedangkan menurut pemahaman dari Nicodemus R Toun selaku anggota DPRD Kabupaten Sintang terhadap model kebijakan yang bersifat intervensi, memberikan pendapat sebagai berikut :

”Dengan model intervensi, perlindungan terhadap usaha industri kecil dan menengah akan terjamin. Disamping itu, selama ini IKM yang berkembang memang masih sangat lemah dalam segala hal, sehingga sangat diperlukan campur tangan pemerintah agar perkembangan IKM tersebut bisa semakin kokoh pondasinya”.

#### **D. PEMBAHASAN**

Pada bagian ini penulis akan melakukan analisis terhadap hasil temuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya. Dalam melakukan analisis ini, penulis memfokuskan diri pada tiga bagian pokok permasalahan penelitian, yaitu analisis prospek penerapan OVOP dalam pengembangan IKM Di Kabupaten Sintang, analisis faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mungkin timbul dalam penerapan OVOP untuk pengembangan IKM dan analisis terhadap model kebijakan yang dianggap paling tepat dalam penerapan OVOP dalam pengembangan IKM Di Kabupaten Sintang,

### a. Analisis Propek Penerapan OVOP Dalam Pengembangan IKM Di Kabupaten Sintang

Setelah memperhatikan data yang diperoleh, penulis berpendapat bahwa penerapan OVOP dalam pengembangan IKM Di Kabupaten Sintang memiliki tingkat prospek yang cukup tinggi. Hal ini terlihat pada parameter potensi dukungan ketersediaan sumber daya, potensi kebutuhan pasar, potensi penciptaan lapangan kerja dan potensi terhadap *multipler effect*. Namun demikian, penerapan OVOP dalam pengembangan IKM Di Kabupaten Sintang sebagai langkah awal lebih tepat berada di wilayah/locus kecamatan. Hal ini terkait dengan masih belum teridentifikainya produk unggulan di setiap desa. Selain itu, penempatan desa sebagai locus sentra IKM terkendala berbagai faktor seperti keterbatasan SDM, infrastruktur yang kurang memadai dan belum tersedianya landaan yuridis penetapan produk unggulan dalam sektor IKM.

Untuk memahami secara lebih komprehensif upaya penerapan OVOP dalam pengembangan IKM di Kabupaten Sintang, berikut ini penulis mencoba melakukan penyusunan analisis SWOT terhadap perkembangan IKM sebagai berikut :

Tabel 4.18. Identifikasi SWOT Terhadap IKM Di Kabupaten Sintang

<p style="text-align: center;"><b>KEKUATAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen</li> <li>• Kebijakan pembangunan daerah</li> <li>• Ketersediaan bahan baku</li> <li>• Ketersediaan tenaga kerja</li> <li>• Eksistensi IKM</li> <li>• Adanya produk IKM yang berciri lokal</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>KELEMAHAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan akses modal</li> <li>• Kelemahan SDM</li> <li>• Promosi yang kurang</li> <li>• Minimnya penguasaan teknologi</li> <li>• Kurangnya dukungan infrastruktur</li> <li>• kelembagaan yang masih lemah</li> <li>• belumny adanya upaya pemberdayaan IKM</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>PELUANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya aturan dari pemerintah pusat</li> <li>• Keterbukaan pangsa pasar global</li> <li>• Kerjasama usaha dalam lingkup regional dan nasional</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>ANCAMAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekspansi produk IKM Impor</li> <li>• Persaingan usaha yang tidak sehat</li> <li>• Orientasi pemerintah yang tidak berpihak kepada IKM</li> <li>• Aturan sektoral yang tumpang tindih</li> </ul>

Adapun penentuan jenis produk industri kecil dan menengah unggulan pada sentra kecamatan di Kabupaten Sintang jika merujuk pada potensi, segmen pasar, dan faktor lainnya, menurut hemat penulis adalah sebagai berikut :

Tabel 4.19 Identifikasi Jenis Produk Unggulan Guna menerapkan OVOP dalam pengembangan IKM di Kabupaten Sintang

No.	Kecamatan	Potensi IKM	Pilihan Produk Unggulan IKM
1.	Sintang	Industri kerajinan, pengolahan kayu dan industri pengolahan makanan	industri pengolahan makanan
2.	Kelam Permai	Industri kerajinan	Industri kerajinan (tenun ikat)
3.	Binjai	Industri pengolahan makanan	Industri pengolahan makanan (tahu dan tempe)
4.	Dedai	Industri kerajinan dan logam	Industri kerajinan (tenun ikat)
5.	Sungai Tebelian	Industri pengolahan makanan dan industri bahan bangunan	Industri bahan bangunan (genteng dan batako)
6.	Sepauk	Industri kerajinan dan pengolahan makanan	Industri kerajinan (anyaman rotan/bambu)
7.	Tempunak	Industri logam	Industri logam (pandai besi)
8.	Kayan Hilir	Industri pengolahan kayu	Industri pengolahan kayu (meubel kayu)
9.	Kayan Hulu	Industri kerajinan	Industri kerajinan (anyaman rotan/bambu)
10.	Serawai	Industri logam	Industri Logam (pandai besi)
11.	Ambalau	Industri logam	Industri logam (pandai besi)
12.	Ketungau Hilir	Industri perikanan	Industri perikanan (olahan berbahan baku ikan)
13.	Ketungau tengah	Industri pengolahan kayu	Industri pengolahan kayu (meubel kayu)
14.	Ketungau Hulu	Industri kerajinan	Industri kerajinan (meubel rotan dan anyaman rotan/bambu)

Sumber : Data Primer, 2009

**b. Analisis Faktor pendukung dan Pengambat yang berpotensi Muncul Jika Penerapan Ovop Dalam Pengembangan IKM Di Kabupaten Sintang.**

Berdasarkan temuan penelitian yang telah penulis paparkan sebelumnya, setelah dilakukan maka penulis berpedapat terdapat beberapa faktor yang mendukung p[enerapan OVOP dalam pengemabngan IKM di Kabupaten Sintang sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dan sekaligus keberpihakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang untuk mengembangkan IKM melalui pendekatan OVOP. Hal ii terbukti dari adanya kebijakan yang mengarah kepada hal tersebut dan juga pernyataan dari otoritas tertinggi dari pemerintah daerah, yaitu Bupati dan wakil bupati Sintang. Keberpihakan pemerintah ditonjolkan melalui berbagai program dan proyek nyata. Konkritisasi diantaranya diwujudkan dalam upaya memerangi kemiskinan dan pengembangan sektor IKM melalui strategi pembangunan pedesaan. Komitmen dan keberpihakan pemerintah daerah ini dapat dipahami karena peran sektor IKM sangat disadari sebagai pondasi perekonomian daerah yang terbukti mampu bertahan dalam berbagai fluktuasi atau gejolak perekonomian.
2. Kesesuaian potensi sumberdaya alam cukup besar di setiap daerah (desa dan kecamatan) yang dapat dikelola sebagai produk unggulan daerah. Kesesuaian potensi sumber daya alam ini memiliki peran penting ketika menerapkan OVOP dalam pengembangan IKM. Pendekatan OVOP sebagai suatu gerakan masyarakat dalam pembangunan daerah berupaya menciptakan produk unggulan dan memiliki daya saing yang berasal dari keunggulan atau keunikan yang dimiliki daerah tersebut. Tidak akan mungkin dapat menciptakan produk IKM tanpa daya dukung sumber daya alam yang besar guna penyediaan bahan baku, tempat pelaksanaan proses produksi maupun berbagai penunjang lainnya.
3. Masyarakat sebagai potensi SDM yang mempunyai keterampilan, etos kerja dan semangat kerjasama dalam melaksanakan aktivitas IKM. Kelompok masyarakat ini menjadi sangat

penting karena di Kabupaten Sintang masih terdapat keterampilan, etos kerja dan semangat kerjasama yang cukup baik sehingga menjadi modal berharga dalam mengembangkan IKM di Kabupaten Sintang. Dengan sentuhan proses pembinaan baik berupa konsultasi dan pelatihan untuk pengembangan SDM maka modal dasar yang sudah dimiliki akan semakin menambah kekuatan SDM di Kabupaten Sintang dalam mendukung penerapan OVOP pada dunia IKM.

4. Tersedianya peluang pasar cukup baik yang dapat diisi baik potensi pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri (ekspor) terhadap produk IKM di Kabupaten Sintang. Berbagai produk IKM yang terdapat di setiap daerah (desa dan kecamatan) Kabupaten Sintang selain ramah dengan kebutuhan konsumen, juga memiliki daya saing yang tinggi dengan produk industri lainnya serta memiliki keunikan yang dapat memikat konsumen baik di tingkat domestik maupun internasional. Jika peluang pasar ini diikuti dengan adanya promosi yang erarah, sistematis dan dilakukan secara sinergis antar stakeholder yang terlibat, maka peluang pasar akan semakin terbuka lebar bagi produk IKM di Kabupaten Sintang.
5. Tersedianya kelompok usaha sosial masyarakat di setiap wilayah baik kecamatan dan desa dalam bentuk koperasi dan kelompok usaha bersama (KUB) dalam mendukung penerapan OVOP dalam pengembangan IKM di Kabupaten Sintang.

Adapun faktor yang berpeluang dapat menghambat jika diterapkannya pendekatan OVOP dalam pengembangan IKM di Kabupaten Sintang sebagai berikut:

1. Dukungan permodalan yang masih lemah.. Dalam hal ini, kapasitas kelompok masyarakat yang bergerak dalam IKM di Kabupaten Sintang masih sangat lemah. Mereka memulai dan melaksanakan aktivitas IKM selama ini dengan permodalan yang sangat terbatas sehingga produksi, mutu, promosi, serta jangkauan pemasarannya menjadi kurang optimal dilakukan. Disaat yang sama, dukungan akses modal dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk

menyediakan kredit/dana bergulir (*revolving fund*) untuk pengembangan IKM masih sangat terbatas.

2. Dukungan teknologi yang tepat guna yang memungkinkan tercapainya peningkatan produktivitas bagi IKM di Kabupaten Sintang masih sangat rendah. Padahal dukungan teknologi terhadap aktivitas industri sangat strategis. Teknologi menjadi sangat menentukan tingkat efisiensi, efektifitas dan produktifitas dari IKM itu sendiri.
3. Dukungan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan listrik terhadap IKM di Kabupaten Sintang juga masih sangat lemah. Ketersediaan infrastruktur tersebut merupakan *Social Overhead Capital*, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan tingkat perkembangan wilayah, yang antara lain dicirikan oleh laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa daerah yang mempunyai kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik, mempunyai tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik pula, dibandingkan dengan daerah yang mempunyai kelengkapan infrastruktur yang terbatas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyediaan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam mendukung penerapan OVOP dalam pengembangan IKM di Kabupaten Sintang. Namun hingga saat ini, jalan dan jembatan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan kecamatan dan desa umumnya belum ada dan jika sudah ada dalam kondisi rusak sehingga mengganggu risubis hasil produk IKM yang telah dihasilkan. Sedangkan infrastruktur dasar seperti listrik, sebagian besar di kecamatan dan desa pada wilayah Kabupaten Sintang belum tersentuh pelayanan listrik yang optimal. Apabila sudah terdapat desa dan kecamatan yang sudah mendapat pelayanan listrik, masih ada sebagian wilayah yang hanya menikmati pelayanan tersebut di malam hari saja, sementara di siang hari yang merupakan fokus aktivitas aktivitas IKM tidak menerima aliran

lisrik. Kondisi ini memang cukup memprihatinkan dan kurang mendukung perkembangan IKM di Kabupaten Sintang. Beberapa tesis menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur akan berdampak positif terhadap berbagai aspek kehidupan. Studi dari World Bank menyatakan bahwa elastisitas Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap infrastruktur di suatu negara adalah antara 0,07 sampai dengan 0,44. Hal ini berarti dengan kenaikan satu persen saja ketersediaan infrastruktur akan menyebabkan pertumbuhan PDB sebesar 7 persen sampai dengan 44 persen, sebuah variasi angka yang sangat signifikan. Secara empiris jelas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan infrastruktur berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi secara makro dan mikro, serta perkembangan suatu negara atau wilayah.

### c. Analisis Model kebijakan Penerapan Ovop Dalam Pengembangan IKM Di Kabupaten Sintang

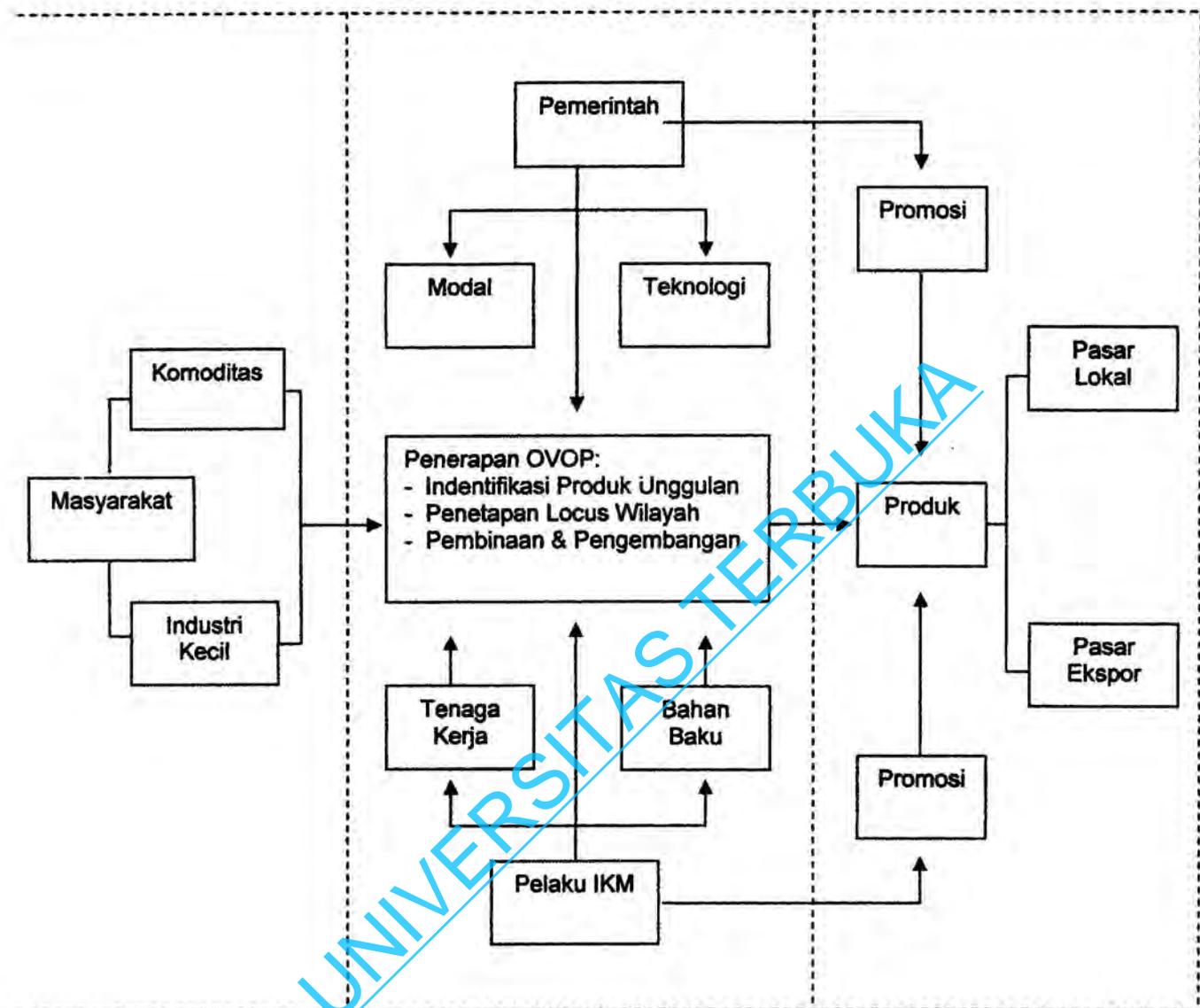
Mengacu pada temuan data yang diperoleh sebelumnya, penulis berpendapat bahwa model kebijakan yang dianggap paling tepat untuk penerapan OVOP dalam pengembangan IKM di Kabupaten Sintang adalah model kemitraan. Model ini pada dasarnya memberikan peran yang proporsional antara pemerintah daerah dan pelaku IKM di Kabupaten Sintang. Pemerintah selain membuat aturan, memberikan dukungan modal teknologi serta menyediakan infrastruktur guna memperlancar proses produksi dan pemasaran produk IKM. Sedangkan masyarakat pelaku IKM melalui kepemilikan dan pemanfaatan bahan baku yang ada dan keterampilan yang dimiliki, berperan sebagai pelaksana IKM sehingga dapat mengubah bahan baku tertentu menjadi suatu produk yang bernilai tinggi dari segi ekonomi. Melalui penerapan model kemitraan dalam penerapan OVOP pada pengembangan IKM akan tercipta dua hal sekaligus, *Pertama;* terwujudnya upaya nyata pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan IKM. *Kedua;*

terlaksananya praktek tata kelola pemerintahan yang baik, dimana peran pemerintah selain sebagai regulator juga sebagai fasilitator dalam urusan ekonomi masyarakat.

Agar model kemitraan untuk penerapan OVOP dalam pengembangan IKM tersebut dapat dilaksanakan, tentunya dibutuhkan operasionalisasi melalui bagan kebijakan yang menggambarkan berbagai konsep di dalamnya. Adapun substansi model kemitraan tersebut, menurut hemat penulis dapat divisualisasikan sebagai berikut:

**UNIVERSITAS TERBUKA**

Model Penerapan OVOP Dalam Pengembangan IKM  
Di Kabupaten Sintang



Berdasarkan model seperti yang terlihat dalam bagan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan OVOP dalam pengembangan IKM terfokus pada usaha IKM yang telah eksis di masyarakat yang di dalamnya telah memperlihatkan produksi suatu produk tertentu. Hal ini perlu dipertegas untuk membedakan konsep OVOP dengan konsep yang mirip dengannya, seperti konsep AEZ misalnya. Seperti dipahami bahwa konsep OVOP tidak identik dengan konsep Agro Ecological Zone (AEZ) atau perwilayahan komoditas unggulan yang mengarahkan suatu kawasan tertentu untuk menghasilkan suatu produk tertentu meskipun aktivitas usahanya belum terbentuk di tengah masyarakat. Sedangkan konsep OVOP diterapkan pada suatu usaha produksi industri produk tertentu disuatu kawasan yang sudah terbentuk tetapi belum optimal terutama dari segi kapasitas produksi maupun jangkauan pasar yang lebih luas.
2. Kemudian tahap selanjutnya melalui suatu kebijakan pemerintah daerah yang memiliki kejelasan dari aspek yuridis seperti peraturan daerah atau peraturan lainnya, ditetapkan penerapan OVOP dalam pengembangan IKM yang didalamnya memuat beragam aktivitas, meliputi identifikasi produk IKM yang paling potensial, menetapkan locus sentra dari produk IKM yang terpilih dan dilaksanakannya upaya pembinaan dan pengembangan usaha secara terpadu yang melibatkan pemerintah daerah pelaku usaha IKM dan masyarakat yang berkepentingan.
3. Setelah hal tersebut dilaksanakan, kemudian harus dilakukan *sharing* atau pembagian tugas, peran dan tanggungjawab antara pemerintah daerah dan pelaku IKM selaku masyarakat sebagai wujud dari penerapan model kemitraan. Dalam hal ini, domain pemerintah daerah diarahkan pada pemberian bantuan modal produktif melalui berbagai mekanisme sesuai dengan kebutuhan, melakukan pengembangan teknologi tepat guna bagi usaha IKM yang ada

serta secara bertahap menyediakan berbagai kebutuhan infrastruktur dasar bagi keperluan aktivitas IKM. Sedangkan domain masyarakat lebih diarahkan pada penyediaan tenaga kerja dan penyiapan bahan baku sesuai dengan potensi sumber daya wilayah yang ada di sentra IKM.

4. Pada tahap selanjutnya, setelah pembagian tugas, peran dan tanggungjawab antara pemerintah daerah dan pelaku IKM dilakukan dilaksanakan secara optimal, maka akan lahir produk IKM yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, dengan sentuhan kemasan menarik dan mutu yang mampu bersaing. Produk usaha IKM yang telah dihasilkan tersebut kemudian harus dikemas dalam suatu strategi promosi yang optimal. Upaya promosi tersebut harus dilakukan secara sinergis antara pemerintah daerah dan pealku IKM di tengah masyarakat.

UNIVERSITAS TERBUKA

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

Setelah memaparkan data mengenai Prospek Penerapan *One Village One Product (OVOP)* dalam pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Sintang dan juga melakukan analisis terhadap data tersebut, maka pada bagian ini penulis akan memberikan simpulan terhadap Prospek Penerapan *OVOP* tersebut. Dari simpulan ini penulis juga akan memaparkan beberapa saran untuk pihak-pihak yang berkepentingan guna Penerapan *OVOP* dalam pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Sintang pada masa yang akan datang.

#### A. Simpulan.

1. Dengan merujuk pada data dan analisis data yang diperoleh, dapat dipahami bahwa pada dasarnya penerapan *One Village One Product (Ovop)* dalam pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Sintang memiliki prospek yang baik. Hal ini terlihat dari beberapa parameter, yaitu potensi dukungan ketersediaan sumber daya, potensi kebutuhan pasar, potensi penciptaan lapangan kerja dan potensi terhadap *multipler effect*. Selain itu, dilihat dari locus penerapan *OVOP* dalam pengembangan IKM di Kabupaten Sintang saat ini lebih tepat berada di kecamatan. Penetapan locus ini merupakan tahap awal dan bersifat sementara, karena melihat kondisi obyektif

yang ada di tingkat desa.. Adapun jenis produk unggulan untuk setiap kecamatan di Kabupaten Sintang sebagai perwujudan pendekatan OVOP yaitu :

- a. Kecamatan Sintang : industri pengolahan makanan.
- b. Kecamatan Kelam permai : industri kerajinan
- c. Kecamatan Binjai Hulu : industri pengolahan makanan
- d. Kecamatan Dedai : industri kerajinan
- e. Kecamatan Sungai Tebelian : industri bahan bangunan
- f. Kecamatan Sepauk: industri kerajinan
- g. Kecamatan Tempunak : industri logam (pandai besi)
- h. Kecamatan Kayan Hilir : industri pengolahan kayu
- i. Kecamatan Kayah Hulu : industri kerajinan
- j. Kecamatan Serawai : Industri logam
- k. Kecamatan Ambalau : industri logam
- l. Kecamatan Ketungau Hilir : industri perikanan
- m. Kecamatan Ketungau tengah : industri pengolahan kayu
- n. Kecamatan Ketungau Hulu : industri kerajinan

2. Faktor-faktor yang berpotensi untuk mendukung penerapan *One Village One Product (Ovop)* dalam pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Sintang adalah :

- a. Adanya komitmen dan keberpihakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang untuk mengembangkan IKM melalui pendekatan OVOP,

- b. Faktor potensi sumberdaya alam cukup besar di setiap desa dan kecamatan.
  - c. Faktor SDM masyarakat yang mempunyai keterampilan, etos kerja dan semangat kerjasama dalam melaksanakan aktivitas IKM,
  - d. Faktor tersedianya peluang pasar cukup baik (dalam negeri maupun luar negeri) terhadap produk IKM di Kabupaten Sintang,
  - e. Faktor tersedianya kelompok usaha masyarakat di setiap desa dan kecamatan dalam bentuk koperasi dan kelompok usaha bersama (KUB).
3. Sedangkan faktor-faktor yang berpotensi untuk menghambat penerapan *One Village One Product (Ovop)* dalam pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Sintang yaitu :
- a. Dukungan permodalan yang masih lemah.
  - b. Dukungan teknologi yang tepat guna bagi IKM masih sangat rendah.
  - c. Dukungan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan listrik masih sangat lemah.
4. Adapun Model kebijakan yang paling tepat (fisibel) untuk Penerapan *One Village One Product (Ovop)* dalam pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Sintang adalah model kebijakan yang bersifat kemitraan. Model kebijakan ini, memberikan ruang yang setara antara hak, kewajiban dan peran antara pemerintah daerah, pelaku IKM di Kabupaten Sintang, sehingga aktivitas IKM dapat berjalan lebih optimal.

## **B. Saran**

Mengacu kepada simpulan yang telah diungkapkan tersebut, maka beberapa saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

### **1. Kepada Pemerintah Daerah disarankan :**

- a. Agar merancang suatu Peraturan Daerah secara khusus untuk dibahas secara bersama dengan pihak DPRD Kabupaten Sintang, dengan materi meliputi : penetapan produk unggulan setiap sentra IKM di masing-masing kecamatan, pembinaan terhadap pelaku IKM, optimalisasi peran motivator dan fasilitator Pemda dalam pengembangan IKM, optimalisasi akses modal dan alih teknologi terhadap pelaku IKM dan dukungan anggaran APBD dalam pengembangan IKM.
- b. Memberikan dukungan permodalan kepada pelaku IKM melalui bantuan modal dengan bunga yang rendah dan juga merintis kerjasama dengan pihak perbankan regional dan nasional, sehingga aktivitas usaha IKM dapat lebih berkembang secara optimal.
- c. Agar membantu secara nyata teknologi tepat guna, bagi IKM di Kabupaten Sintang .
- d. Membantu melakukan promosi dan pemasaran hasil produk IKM melalui penyediaan fasilitas pada mereka untuk mengikuti berbagai event promosi dan pemasaran, seperti pameran, temu bisnis dan lain-lain sehingga produk yang dihasilkan dapat menembus skala pemasaran yang lebih luas.

- e. Merevitalisasi dan mengotimalisasi peran Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di bidang industri kecil dan menengah sehingga pengetahuan dan keterampilan pelaku IKM menjadi semakin meningkat.
  - f. Membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan listrik di wilayah kecamatan yang menjadi sentra penerapan OVOP dalam pengembangan IKM di Kabupaten Sintang. Dukungan infrastruktur tersebut akan menjadi daya ungkit terhadap produksi dan pemasaran produk IKM yang telah dihasilkan.
2. Kepada DPRD Kabupaten Sintang.
- a. Menggunakan hak inisiatif dewan untuk melahirkan Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus tentang penerapan *One Village One Product (OVOP)* dalam pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Sintang.
  - b. Melalui fungsi anggaran yang dimiliki, diharapkan DPRD lebih mengarah pada anggaran yang pro IKM di Kabupaten Sintang.
  - c. Melalui fungsi pengawasan yang terdapat dalam institusi DPRD, diharapkan dapat melakukan pengawasan yang konstruktif terhadap program pengembangan IKM yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah.

3. Kepada Pelaku IKM disarankan :

- a. Melakukan pembenahan diri berupa peningkatan etos kerja, menerapkan manajemen bisnis yang professional serta mengoptimalkan jiwa kewirausahaan dalam pengembangan IKM yang dijalankan.
- b. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun kelompok perbankan serta pelaku usaha lainnya, sehingga terjalin jaringan bisnis industri yang kuat dan sehat.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi industri sesuai dengan tuntutan pasar, baik domestik maupun ekspor, sehingga produk yang dihasilkan mampu bersaing secara global.

UNIVERSITAS TERBUKA

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdin, Said Zaunal (2002). *Kebijakan Publik* Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Arsyad, L. (1999). *Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah*. Yogyakarta: PT BPF
- Azwar, Saifuddin, (1998). *Metode Penelitian, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.
- Bappeda Kabupaten Sintang. (2005). *Rencana pembangunan jangka menengah Sintang*: Kabupaten Sintang
- Blakely EJ, Bradshaw TK. (2002). *Planning local economic development*. London Sage Publication
- Barata, Gunadi. 2003. *Analisis Faktor Mempengaruhi Perkembangan Industri Kecil Dan Menengah*. Makalah yang dipublikasikan
- Bregman EM, Feses EJ. (2003). *Industrial and Regional Cluster Concept and Competitive*.
- Dasuki. (2006). *Model Pemberdayaan sosial K A T dalam kontek otonomi daerah*
- Dhorifi, Zumar. (2007). *Siasat Baru Dongkrak IKM*
- Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sintang (2008). *Data Perkembangan Idustri Kecil Dan Menengah di Kabupaten Sintang*. Disperindag Kabupaten Sintang
- Dunn, William N. (1998). *Analisa Kebijakan Publik*, Penterjemah: Muhajir Darwin, Yogyakarta :Graha Widya.
- Direktorat Jendral Industri Kecil dan Menengah (2002). *Rencana induk pengembangan industry kecil menengah 2002-2004*. Jakarta: Ditjen Industri Kecil dan Menengah, Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia
- Endi Jaweng, Robert. (2007, 13 Mei). *Sektor unggulan bagi akselerasi pembangunan lokal dalam Harian Bisnis Indonesia* Hal V
- Eriyatno. (1999). *Ilmu sistem – meningkatkan mutu dan efektivitas manajemen*. Edisi Ke-2. Bogor: IPB Press.

- Furhan, Arief, 1982, *Pengantar metode penelitian kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional
- Hamel G. Prahalad CK. (1994). *Competing for the Future*. Boston: Harvard Business School Press.
- Islamy, Irvan. MI. (1998). *Materi Pokok Kebijakan Publik*. Jakarta: Karunia UT
- Islamy, M. Irfan. (1997). *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- ..... (2000). *Kebijakan publik dan kepentingan daerah*. Makalah disajikan pada *Diklat Pendalaman Bidang Tugas Anggota DPRD Kediri*: Badan Diklat Kota Kediri
- Jones. C.O. (1991). *Pengantar kebijakan publik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Juzar. A. (2006). *Model strategi pengembangan kluster agroindustri unggulan menggunakan kompetensi inti di daerah kabupaten dan Kota Bogor*. Disertasi Program Doktorat Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Kismartini, et al. (2008). *Analisis kebijakan publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Lubis, Theresiah. (2006). *Community development dan nilai-nilai yang mendasar*. Makalah dipresentasikan pada *Temu Ilmiah Dalam Rangka LUSTRUM IX Fakultas Psikologi Unpad*. Bandung: Universitas Padjadjaran
- Marimin. (2004). *Pengambilan keputusan kriteria majemuk*. Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia.
- Moleong, L.J. (2000). *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Miles, M.B. dan Huberman, M. (1992). *Analisis data kualitatif*. Jakarta : UI Press. Jakarta.
- Nawawi, H. 1981. *Metode penelitian sosial*. Pontianak : Universitas Tanjungpura.
- Nugroho, R. 2002. *Public policy*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

- Nur Effendi, Tadjudin. (2006). *Konsep dan model pengembangan masyarakat; contoh implementasi untuk pemberdayaan masyarakat Mimika.Papua*. Makalah yang dipublikasikan
- Oita OVOP International Exchange Promotion Committee. *One village one product movement*. [<http://www.pref.oita.pj/>].
- Direktorat Jendral IKM (2007). *Peraturan Menteri Perindustrian nomor: 78/M-IND/PER/9/2007 tentang Peningkatan efektifitas engembangan indutsri kecil dan menengah melalui pendekatan ovop di sentra*. Jakarta: Departemen Perindustrian Republik Indonesia.
- Sekretariat Negara (2008). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang kebijakan industri nasional*. Jakarta: Republik Indonesia
- Solihin, Dadang dan Marhayudi, Putut. (2002). *Panduan lengkap otonomi daerah*, Jakarta: Penerbit ISMEE
- Sugiyono. (2005). *Metode penelitian administrasi*, Jakarta: Gunung Agung
- Sulistiyani, Ambar Teguh. (2004). *Kemitraan & model-model pemberdayaan masyarakat*
- Strauss, A dan Corbin, J. 1997. *Dasar-dasar penelitian kualitatif: prosedur, tehnik dan teori grounded*. Surabaya: PT Bina Ilmu
- Thoha, Miftah. (1984). *Perilaku organisasi*. Jakarta: PT Rajag Rafindo Persada
- Thoha, Miftah. (1992). *Dimensi-dimensi prima ilmu administrasi negara*. Jakarta: PT Rajag Rafindo Persada
- Tarigan, Robinson (2005: 32). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarata: PT Bumi Aksara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 *tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 *tentang Jalan*.
- Undang-Undang No. 9 tahun 1995 *tentang Usaha Kecil*.
- Wahab, SA. (1990). *Pengantar analisis kebijakan negara*. Jakarta : Rineka Cipta.

- Wahab, Solihin Abdul. (1990). *Pengantar analisis kebijakan negara*. Renika Cipta Jakarta.
- ..... (1997). *Analisis kebijaksanaan: dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara .
- ..... (1999). *Analisis kebijakan publik: teori dan aplikasinya*. Malang: PT Danar Wijaya Brawijaya University Press.
- Wijaya, HWA. (2001). *Otonomi daerah dan daerah otonom*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Winarno,B. (2002). *Teori dan proses kebijakan publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Yoshimura, T. (2004). *Sustainable local development and revitalization: case of one village one product movement: its principles and implications*. United Nations Centre for Regional Development (UNCRD). [[Http://www.uncrd.or.jp](http://www.uncrd.or.jp)].

UNIVERSITAS TERBUKA

### PEDOMAN OBSERVASI

No	Fokus Observasi	Keterangan		Keterangan
		Ada/baik	Tidak ada/tidak baik	
<b>I</b>	<b>PROSPEK</b>			
1.	Ketersediaan produk unggulan			
2.	Daya dukung potensi sumber daya alam			
3.	Tingkat dan jenis ketrampilan yang diperlukan			
4.	Ketersediaan dan keterbukaan pasar			
5.	Komoditas/produk mempunyai prospek dipasarkan meskipun produksinya belum berkembang.			
6.	Ketersediaan tenaga-kerja			
7.	Kegiatan industri Terkait dengan upaya pelestarian seni-budaya daerah.			
8.	Ketersediaan bahan baku			
<b>II</b>	<b>FAKTOR PENDUKUNG/PENGAMBAT</b>			
1.	Sistem kebijakan			
2.	Modal			
3.	Teknologi			
4.	Kelembagaan Sosial			
<b>II</b>	<b>MODEL KEBIJAKAN PENERAPAN OVOP</b>			
1.	Analisi model kebijakan			
2.	Jenis model kebijakan			

## PEDOMAN WAWANCARA

### IDENTITAS RESPONDEN

Nama : \_\_\_\_\_  
 Umur : \_\_\_\_\_  
 Jenis Kelamin : \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_

### PERTANYAAN:

#### I. PROSPEK PENERAPAN *ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP)* DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN SINTANG

1. Menurut saudara/i apakah terdapat produk unggulan dan/atau produk kompetensi inti di kecamatan/desa untuk diterapkan melalui pendekatan *One Village One Product (Ovop)* dalam pengembangan IKM?
2. Menurut saudara/i apakah terdapat produk yang unik khas budaya dan keaslian lokal di kecamatan/desa untuk diterapkan melalui pendekatan *One Village One Product (Ovop)* dalam pengembangan IKM?
3. Menurut saudara/i apakah terdapat produk berpotensi pasar domestik dan ekspor di kecamatan/desa untuk diterapkan melalui pendekatan *One Village One Product (Ovop)* dalam pengembangan IKM?
4. Menurut saudara/i apakah terdapat produk Bermutu dan berpenampilan baik; di kecamatan/desa untuk diterapkan melalui pendekatan *One Village One Product (Ovop)* dalam pengembangan IKM?
5. Menurut saudara/i apakah terdapat produk yang diproduksi secara kontinyu dan konsisten di kecamatan/desa untuk diterapkan melalui pendekatan *One Village One Product (Ovop)* dalam pengembangan IKM?
6. Menurut saudara/i apakah pada locus mana (kabupaten, kecamatan, desa) penerapan pendekatan *One Village One Product (Ovop)* dalam pengembangan IKM di Kabupaten Sintang?
7. Menurut saudara/i apakah prospek penerapan pendekatan *One Village One Product (Ovop)* dalam pengembangan IKM di Kabupaten Sintang cukup baik dilihat dari potensi wilayah, ketersediaan bahan baku, produksi suatu produk lokal dan pemasaran?

## **II. FAKTOR-FAKTOR APA YANG SAJA MENDUKUNG DAN MENGHAMBAT PENERAPAN ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP) DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN SINTANG**

1. Menurut saudara/i apakah sistem kebijakan yang ada di daerah mendukung penerapan pendekatan *One Village One Product (Ovop)* dalam pengembangan IKM di Kabupaten Sintang?
2. Menurut saudara/i apakah faktor jenis produk ada di daerah mendukung atau menghambat penerapan pendekatan *One Village One Product (Ovop)* dalam pengembangan IKM di Kabupaten Sintang?
3. Menurut saudara/i apakah faktor segmentasi pasar di daerah mendukung atau menghambat penerapan pendekatan *One Village One Product (Ovop)* dalam pengembangan IKM di Kabupaten Sintang?
4. Menurut saudara/i apakah faktor modal mendukung atau menghambat penerapan pendekatan *One Village One Product (Ovop)* dalam pengembangan IKM di Kabupaten Sintang?
5. Menurut saudara/i apakah faktor teknologi mendukung atau menghambat penerapan pendekatan *One Village One Product (Ovop)* dalam pengembangan IKM di Kabupaten Sintang?
6. Menurut saudara/i apakah faktor kelembagaan sosial mendukung atau menghambat penerapan pendekatan *One Village One Product (Ovop)* dalam pengembangan IKM di Kabupaten Sintang?

## **III. MODEL KEBIJAKAN YANG TEPAT UNTUK PENERAPAN ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP) DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN SINTANG**

1. Menurut saudara/i apakah model kebijakan yang bersifat non intervensi yang tepat untuk Penerapan *One Village One Product (Ovop)* dalam pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Sintang
2. Menurut saudara/i apakah model kebijakan yang bersifat kemitraan yang tepat untuk Penerapan *One Village One Product (Ovop)* dalam pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Sintang
3. Menurut saudara/i apakah model kebijakan yang bersifat intervensi yang tepat untuk Penerapan *One Village One Product (Ovop)* dalam pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Sintang